

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara $7,3^{\circ}$ – $7,5^{\circ}$ LS (Lintang Selatan) dan antara $112,5^{\circ}$ – $112,9^{\circ}$ BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km² ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya disebelah utara dan Kali Porong disebelah selatan.

Kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

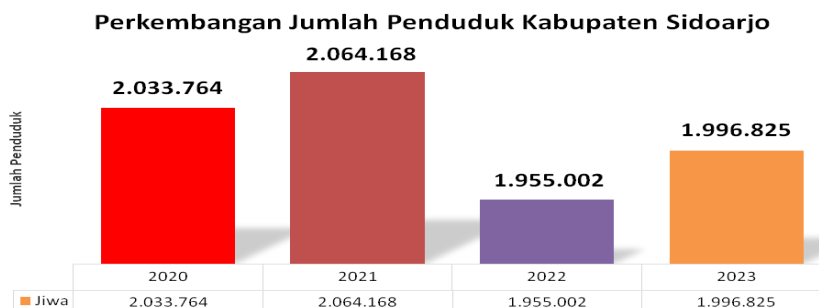
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,22
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81,00
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongsendo	31,40
Jumlah		714,24

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Struktur Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
75 <	14.647	20.475	35.122
70 -74	17.232	17.792	35.024
65 -69	32.572	31.703	64.275
60 - 64	45.908	49.455	95.363
55 -59	60.405	64.519	124.924
50 -54	74.472	79.301	153.773
45 -49	72.806	78.136	150.942
40 -44	80.079	82.475	162.554
35 -39	73.154	71.794	144.948
30 -34	73.381	71.087	144.468
25 -29	78.666	75.926	154.592
20 -24	83.427	79.342	162.769
15 -19	74.180	69.818	143.998
10 – 14	81.512	76.637	158.149
05 - 09	75.542	70.698	146.240
00 - 04	62.084	57.600	119.684
JUMLAH	1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	TARIK	34.009	33.449	67.458
2	PRAMBON	39.650	38.810	78.460
3	KREMBUNG	34.209	34.193	68.402
4	PORONG	35.282	34.888	70.170
5	JABON	27.701	27.452	55.153
6	TANGGULANGIN	43.601	43.560	87.161
7	CANDI	76.901	77.021	153.922
8	SIDOARJO	98.027	99.729	197.756
9	TULANGAN	50.737	50.440	101.177
10	WONOAYU	42.245	41.519	83.764
11	KRIAN	65.942	64.470	130.412
12	BALONGBENDO	37.461	36.472	73.933
13	TAMAN	100.366	100.039	200.405
14	SUKODONO	61.383	60.571	121.954
15	BUDURAN	49.530	49.469	98.999
16	GEDANGAN	59.289	59.049	118.338
17	SEDATI	47.751	47.526	95.277
18	WARU	95.983	98.101	194.084
JUMLAH		1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

.2 Penyajian Data

Dibawah ini merupakan penyajian data dari hasil pengumpulan dan pengelolaan data primer ataupun data skunder yang didapatkan melalui teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi, Penjelasannya disampaikan dibawah ini :

4.2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Organisasi perangkat daerah ialah wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. berikut ini adalah susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud :

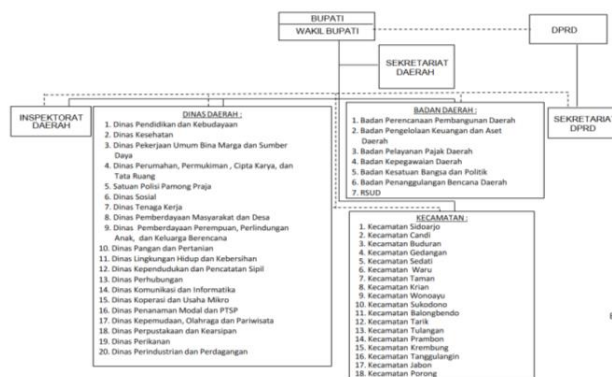
- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
- D. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 6) Dinas Sosial
 - 7) Dinas Tenaga Kerja

- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana
 - 10) Dinas Pangan dan Pertanian
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 13) Dinas Perhubungan
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 15) Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 19) Dinas Perikanan
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- E. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- F. Kecamatan terdiri dari
- 1) Kecamatan Sidoarjo
 - 2) Kecamatan Candi
 - 3) Kecamatan Buduran
 - 4) Kecamatan Gedangan
 - 5) Kecamatan Sedati

- 6) Kecamatan Waru
- 7) Kecamatan Taman
- 8) Kecamatan Krian
- 9) Kecamatan Wonoayu
- 10) Kecamatan Sukodono
- 11) Kecamatan Balongbendo
- 12) Kecamatan Tarik
- 13) Kecamatan Tulangan
- 14) Kecamatan Prambon
- 15) Kecamatan Krembung
- 16) Kecamatan Tanggulangin
- 17) Kecamatan Jabon
- 18) Kecamatan Porong

Pola Koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo digambarkan dalam bagan berikut :

Gambar 4.3 Bagan Pola Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Perbup 48 Tahun 2020 tentang SOTK Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo

4.2.2 Transformasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Paragraf 1 Bagian Pemerintahan Pasal 11 huruf d Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi, pada angka (7) menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun jika merujuk aturan sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah Bagian Administrasi Pembangunan. Perpindahan Tugas pokok dan Fungsi ini tidak lain merupakan akibat adanya perubahan aturan Pemerintah Pusat yang mengatur tentang penyusunan dokumen LPPD itu sendiri, yang semula aturan pada mulai melakukan pelaporan kepada Pemerintah Pusat diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain tim penyusun LPPD yang berubah, terdapat juga beberapa perubahan indikator dan perubahan kategori status kinerja berdasarkan skor

kinerja daerah, yang mana hal ini berdampak terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Bagian Pemerintahan sendiri mulai melaksanakan fungsi sebagai sekretariat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mulai tahun 2021 (Pelaporan LPPD Tahun Anggaran 2020). Saat awal dilakukan pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidaorjo kepada Pemerintah Pusat, dilakukan pengumpulan data dengan cara manual, yakni dengan desk tatap muka serta masih menggunakan data print out atau hardcopy untuk data dukungannya.

Gambar 4.4 File Arsip Data Bukti Dukung LPPD Tahun 2020 dan Tahun 2021



Sumber : Arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020

Gambar 4.5 Pelaksanaan Desk tatap muka pada proses pengumpulan data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD tahun 2021



Sumber : arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020

Adanya pandemi corona virus 19 (Covid-19) sejak tahun 2019 yang telah menimpa seluruh negara di dunia banyak mempengaruhi semua sendi kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut terjadi mulai dari aktifitas keseharian, perubahan gaya hidup yang juga berpengaruh terhadap kegiatan pemerintahan baik pada kegiatan administrasi utamanya kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya tatap muka karena dapat menjadi sumber peningkatan penyebaran covid-19 ditengah-tengah Masyarakat. Selain itu sistem persuratan yang masih manual dalam bentuk printout menjadi tidak optimal, karena pada saat pandemi covid-19 dilakukan WFH (Work From Home) dan WFA (Work From Arrantment) yang mempengaruhi proses penandatanganan surat, pendistribusian surat dan disposisi surat yang mana kegiatan- kegiatan tersebut dapat berpotensi sebagai sarana penularan covid-19.

Namun, terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan tidak terkecuali kegiatan pemerintahan mendorong terselenggarakannya transformasi digital pada segala aspek. Transformasi digital mencakup penggunaan serta kemampuan dalam menerapkan teknologi digital kepada aparatur pemerintah. Hal inilah yang menjadi cikal bakal digitalisasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2020, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo Bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Membangun Sistem pengumpulan data LPPD Berbasis elektronik yang dapat diakses oleh operator penginput data Perangkat Daerah pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) darimana saja dan kapan saja, tidak mengikat harus dilakukan dengan prosedur tatap muka.

Selain itu dengan adanya perubahan dasar pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang apabila di

dilihat dari Aspek komposisi data yang di sajikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

No	Aspek	Jumlah Urusan	Jumlah IKK
1	Tataran Pengambil Kebijakan	13	39
2	Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi umum	8	21
3	Tataran pelaksana kebijakan umum urusan wajib dan pilihan		
	A Urusan Wajib	22	67
	B Urusan Pilihan	6	11
	C Usan Penunjang	1	6
	D Urusan Pemerintahan Umum	1	2

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Tabel 4.5 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

No	Aspek	Jumlah Urusan	Jumlah IKK
1	Indikator Kinerja Kunci Makro	6	6
2	Indikator Kinerja Kunci Outcome		
	A Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	41
	B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	18	46
	C Urusan Pilihan	8	18
	D Urusan Fungsi Penunjang	5	18
3	Indikator Kinerja Kunci Output		
	A Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	237
	B Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	18	213
	C Urusan Pilihan	8	44
	D Urusan Fungsi Penunjang	5	-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada jumlah IKK yang harus dipenuhi capaian serta data dukungnya, pada Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat terdapat 51 urusan dan 145 IKK, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat 37 urusan dan 632 IKK yang terdiri dari 140 IKK Outcome dan 492 IKK Output. Adapun dalam penilaian keabsahan Data Capaian dan Bukti dukung IKK, yang dinilai adalah IKK Outcome,, sedangkan IKK Output merupakan data pendukung apabila ada capaian pada IKK Output yang belum sesuai.

Adanya transformasi pemenuhan aspek beserta Indikator Kinerja Kunci pada penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang cukup signifikan tersebut ada beberapa indikator yang belum maksimal atau tidak tersedia datanya di Perangkat Daerah akibat kurangnya pemahaman ataupun tidak tepatnya Perangkat Daerah dalam menginterpretasikan maksud dari data yang diinginkan oleh tiap tiap indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah ditentukan pusat, selain itu kurangnya pemahaman tentang kelengkapan dokumen bukti dukung juga mempengaruhi kevalidan data yang di sampaikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal tersebut tentu dapat mengurangi skor penilaian pelaporan LPPD

Kabupaten Sidoarjo oleh tim evaluator daerah (Timda) maupun tim evaluator pusat (Timnas).

Berdasarkan kondisi tersebut, dan juga mengingat waktu yang terbatas dalam melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu 3 bulan sejak berakhirnya Tahun anggaran Daerah, Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, melakukan kegiatan yang disebut dengan Pra Evaluasi, yakni pelaksanaan evaluasi sekaligus pendampingan yang pelaksanaannya dilakukan oleh evaluator Internal, yakni Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, dan evaluator Eksternal yang terdiri dari Tim evaluator daerah Provinsi, (Timda) yakni Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur maupun tim evaluator pusat (Timnas) yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

4.2.3 Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh OPD Pelaksana.

Melalui pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tersebut, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan Kepala Daerah, dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dengan baik. Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) wajib diverifikasi atau di validasi oleh inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai berikut :

Tabel 4.6 Sistematika Laporan LPPD

SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD (Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)			
I	BAB I PENDAHULUAN	1. 2. 3.	Latar Belakang Perencanaan Pembangunan Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
II	BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. 2.	Capaian Kinerja Makro (IPM, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per kapota, Ketimpangan Pendapatan) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan a. 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar b. 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar c. 8 Urusan Pilihan

SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD (Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)			
			d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
III	BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	1. 2. 3. 4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan a. Target Kinerja b. Realisasi c. Permasalahan dan Kendala d. Saran dan Tinadk Lanjut
IV	BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Laporan penerapan dan pencapaian SPM memuat sebagai berikut : Jenis Pelayanan Dasar Target Pencapapaian SPM oleh Daerah Realisasi Alikasi Anggaran Dukungan Personil Permasalahan dan Solusi
V	BAB V PENUTUP	1. 2. 3.	Kesimpulan Saran Penutup

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa penyusuna Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) mulai tahun 2020 sudah tidak lagi menggunakan format IKK II.1, II.2 dan II.3 namun menggunakan IKK Outcome dan Output yang jumlahnya meningkat sangat signifikan. Berikut adalah rekapitulasi IKK Output dan Outcome berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu.

Tabel 4.7 Tabel Rekapitulasi IKK Outcome dan Output Per Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

No	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA	Jumlah IKK Outcome	Jumlah IKK Output
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	41	237
1	Pendidikan	4	53
2	Kesehatan	14	26
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	78
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	33
5	Ketentraman, Ketertibab Umum dan Perlindungan Masyarakat	7	26
6	Sosial	2	21
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	46	213
1	Ketenagakerjaan	5	45
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	3	14
3	Pangan	1	8
4	Pertanahan	6	4
5	Lingkungan Hidup	3	8
6	Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	8
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarag Berencana	3	11
9	Perhubungan	2	5
10	Komunikasi dan Informatika	3	20

No	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA	Jumlah IKK Outcome	Jumlah IKK Output
11	Koperasi dan UMK	2	20
12	Penanaman Modal	1	12
13	Kepemudaan dan olahraga	3	6
14	Statistik	2	7
15	Persandian	1	4
16	Kebudayaan	1	19
17	Perpustakaan	2	8
18	Kearsiapn	2	10
C	Urusan Pilihan	18	44
1	Kelautan Dan Perikanan	1	5
2	Pariwisata	5	10
3	Pertanian	2	5
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1
5	Perdagangan	3	11
6	Perindustrian	6	5
7	Kehutanan	0	4
8	Transmigrasi	0	3
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	18	0
1	Perencanaan dan keuangan	6	0
2	Pengadaan	3	0
3	Kepegawaian	3	0
4	Manajemen Keuangan	4	0
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	2	0
	TOTAL IKK	123	494

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Yang dalam pelaksanaannya, masing-masing indikator tersebut di distribusikan kepada OPD pelaksana yang ada di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, dari 47 OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hanya 26 OPD yang melaksanakan indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan,

Inspektorat dan 1 Bagian dari Sekretariat Daerah yang pembagian perurusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Data Perangkat Daerah Pengampu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Urusannya

No	Perangkat Daerah Pengampu	Urusan yang Diampu
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan
		Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan	Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Binas Marga dan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum
4.	Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum
		Perumahan Rakyat
		Pertanahan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7.	Dinas Sosial	Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian
		Perdagangan
10.	Dinas Koperasi dan UMK	Koperasi dan UMK
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Pangan
		Pertanian
12.	Dinas Perikanan	Perikanan
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Lingkungan Hidup
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.		Komunikasi dan Informatika

No	Perangkat Daerah Pengampu	Urusan yang Diampu
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persandian Statistik
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Perhubungan	Perhubungan
20.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Kearsipan Perpustakaan
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang : - Perencanaan dan Keuangan - Manajemen Keuangan
23.	Badan Kepegawian Daerah	Fungsi Penunjang : - Kepegawaian
24.	Sekretariat Daerah : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Fungsi Penunjang : - Pengadaan
25.	Inspektorat	Fungsi Penunjang : - Perencanaan dan Keuangan - Transparansi dan Partisipasi Publik
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	IKK Makro

Sumber : Dokumen LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

4.2.3.1 Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan kebutuhan data Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri DALAM Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari 47 OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

hanya 26 OPD yang melaksanakan indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan, Inspektorat dan 1 Bagian dari Sekretariat Daerah. Adapun susunan keanggotaan dan ketugasan Tim Pelaksanan penyusunan LPPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagai berikut :

Tabel 4.9 Keanggotaan TIM Koordinasi Penyusunan LPPD

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
1	Pengarah I	Bupati Sidoarjo	
2	Pengarah II	Wakil Bupati Sidoarjo	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	
4	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
5	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
6	Wakil Ketua III	Asisten Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
7	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
8	Anggota	a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo	
		b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur	
		e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.	
		f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo	
		h. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		i. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo	
		j. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	
		k. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		l. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		m. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		n. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		o. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		p. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		q. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		r. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Kabupaten Sidoarjo	
		s. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		t. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran Pendapatan BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		u. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Sidoarjo	
		v. Perencana Ahli Muda Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		w. Perencana Ahli Muda Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sidoarjo	
		x. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Pelaporan dan Kinerja Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		y. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Penyusunan Program Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		z. Analis Kebijakan Ahli Muda Subbagian Pengendalian Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		aa. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Bagian	

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Perangkat Daerah	Ket
		Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	
		bb. Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, yang ditunjuk	
		cc. Analis Ahli Muda Kebijakan Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	
		dd. Perencana Ahli Muda Dinas, Badan Se-Kab Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja	
		ee. Perencana Ahli Muda Dinas, Badan Se-Kab Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja	
		ff. Staf Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo	Yang ditunjuk

Sumber : Dokumen SK TIM Penyusunan LPPD Tahun 2024

4.2.4 Strategi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi pemerintah, penyusunan dan penyajian sebuah dokumen serta laporan menjadi bagian dari aktifitas pemerintahan itu sendiri. Salah satunya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, lebih lanjut pelaksanaan pelaporannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah pusat, LKPJ Kepada DPRD dan informasi LPPD.

Di susunnya Laporan-laporan tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan upaya mencincipatakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut disusun dan paling lambat disampaikan kepada pemerintah pusat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang mana lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pemerintah Pusat.

4.2.4.1 Website Portal Data Kinerja

Dalam rangka efektif dan efisien dalam pengumpulan data untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Urusan serta Indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Website Portal Data kinerja, yaitu sebuah sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Gambar 4.8 Tampilan Website Portal Data Kinerja

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN	KET	DIPERBARU PEMDA	FILE BUKTI	STATUS	AKSI
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD x100%	57385 57383 100,00%	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 57385 peserta didik	20-02-2024_15:52:13	1365 outcome-20-02-2024_15-52-13.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status APPV: OK	Detail, Edit, Unduh, Hapus
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar x100%	182521 182979 99,75%	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar sebanyak 182521 peserta didik	20-02-2024_16:01:04	1373 outcome-20-02-2024_16-01-04.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status APPV: OK	Detail, Edit, Unduh, Hapus
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama x100%	95547 95651 99,89%	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama di kabupaten Sidoarjo sebanyak 95547 peserta didik	20-02-2024_16:09:40	1393 outcome-20-02-2024_16-09-40.pdf	Sudah diverifikasi Kepala OPD Status APPV: OK	Detail, Edit, Unduh, Hapus

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

Dibangunnya website portal data kinerja tidak lain adalah untuk untuk menjawab berbagai kendala yang ada, antara lain :

1. Memudahkan proses pengumpulan data bagi Perangkat Daerah Pelaksana urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dimana yang sebelumnya dilaksanakan masih dilakukan secara manual yakni Perangkat Daerah pelaksana urusan harus bertatap muka dengan TIM penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berada di bagian pemerintahan, lain tidak efisien waktu dan tenaga, hal ini juga tidak efektif dalam menjamin data yang di butuhkan sudah terpenuhi, karena database urusan yang akan dilaporkan seringkali tidak tepat,

sehingga staf Perangkat Daerah pelaksanaan urusan harus berkali-kali melakukan tatap muka sampai dengan data sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing indikator urusan. Sedangkan dengan telah dibangunnya Website Portal Data Kinerja ini, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak perlu melakukan tatap muka langsung dengan TIM penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berada di bagian pemerintahan, karena pengumpulan data sudah bisa langsung melalui Website, dimana dalam website Portal Data Kinerja dimaksud, telah dilengkapi dengan fitur input data, upload bukti dukung, dan penjelasan terkait masing-masing data indikator yang harus diisi oleh Perangkat Daerah.

Gambar 4.9 Fitur Pengumpulan Data Bagi Perangkat Daerah Penyelenggara Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

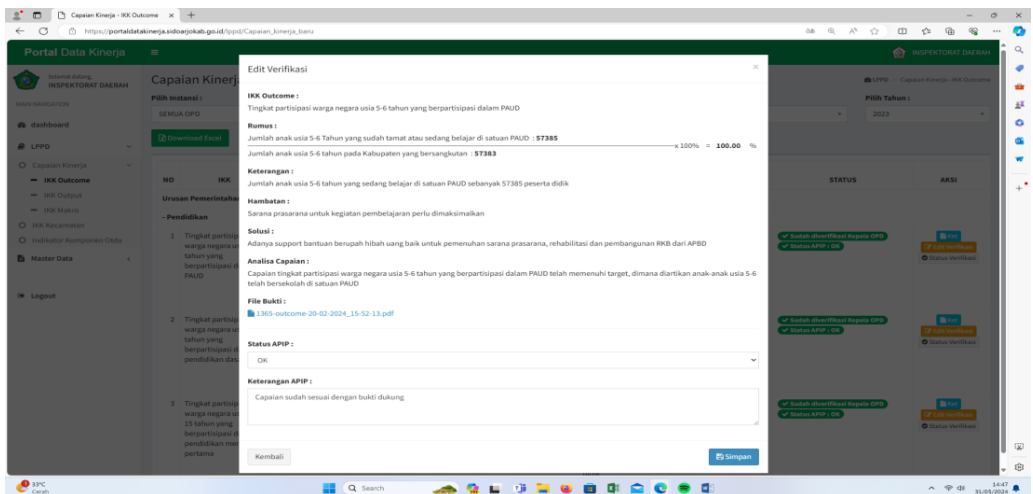
The screenshot displays the 'Portal Data Kinerja' web application interface. The main content area shows an 'Edit' form for an 'IKK Outcome'. The form includes the following sections:

- IKK Outcome:** Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- Rumus:**
 - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
 - 201530
 - Jumlah Warga Negara yang berada di Kawasan Rawan Bencana di wilayah Kabupaten
 - 201530
 - 100%
 - 100,00
- Keterangan:**
 - Rincian 2023 : Jumlah peserta KIE Tabung Muka 6.210 orang
 - didanai/dibagi dengan penyebaran informasi rawan bencana melalui media sosial (WA Group, Instagram, Website, sebanyak 2.085.720 orang (saat ini))
- Hambatan:**
 - Terbatasnya sumber daya APBD untuk menyusun KRB, tersatunya SDM dan sarana prasarana dalam pelaksanaan penyebaran informasi rawan bencana
- Solusi:**
 - Dokumen KRB sampai level desa, peningkatan kuantitas sumber daya aparatur dan sarpras
- Analisa Capaian:**
 - Masukkan Analisa Capaian
- File Bukti:** 1557-outcome-15-03-2024_14-43-32.pdf
- Choose File:** No file chosen
- File Upload:** No file chosen

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

2. Memudahkan pelaksanaan evaluasi bagi TIM evaluator pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam hal ini Tim evaluator internal dan eksternal, dimana yang sebelumnya harus dilakukan tatap muka dalam setiap proses evaluasi, namun dengan adanya Website Portal Data Kinerja, evaluasi dapat dilakukan dengan metode virtual karena di dalam portal data kinerja telah kami berikan juga fitur evaluasi, yakni pemberian keterangan apakah sudah sesuai antara data serta bukti dukung yang diinginkan oleh indikator tiap urusan dengan data serta bukti dukung yang diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Selain itu juga tersedia fitur pemberian masukan oleh evaluator, yakni penyampaian perbaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.

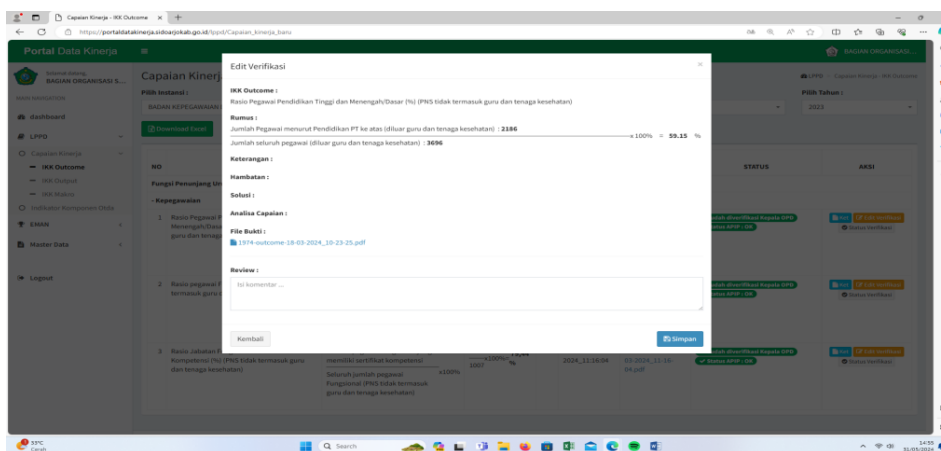
Gambar 4.10 Fitur Evaluasi dan Rekomendasi bagi Tim evaluator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

3. Memudahkan monitoring data serta pelaporan bagi jajaran pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. dimana sebelumnya tidak ada akses monitoring langsung dari jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal bagaimana capaian serta urusan yang sudah tercukupi kinerja dan data dukungnya. Namun dengan adanya Website Portal Data Kinerja, kami menambahkan fitur verifikasi Kepala OPD, dimana data-data yang di inputkan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Kepala OPD sebelum selanjutnya dilakukan evaluasi oleh TIM evaluator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), selain itu kami juga menyediakan fitur lihat dan penambahan komentar bagi seluruh Asisten, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati. Sehingga harapannya jajaran pimpinan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terlibat langsung dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Gambar 4.11 Fitur Monitoring Bagi Jajaran Pimpinan



Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

4. Memudahkan penyimpanan serta sebagai sarana kompilasi data dari tahun ketahun bagi Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun yang sebelumnya dokumen dalam bentuk Hardfile biasanya rawan dalam penyimpanan, mulai dari dokumen hilang, dokumen lapuk, dan dokumen yang terpencair-pencar. Namun dengan sistem penyimpanan digital, diharapkan dapat memudahkan penyimpanan maupun pencarian data

Gambar 4.12 Fitur Penyimbapan Berdasarkan Tahun

CAPAIAN	KET	DIPERBARUI PEMDA	FILE BUKTI	STATUS
385 —x100%= 100,00 % 383	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD sebanyak 57385 peserta didik	20-02-2024_15:52:13	1365-outcome-20-02-2024_15-52-13.pdf	<p>✓ Sudah diverifikasi Kepala</p> <p>✓ Status APIP : OK</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Edit Verifikasi <input checked="" type="checkbox"/> Status Verifikasi <input type="button" value="Hapus"/> </p>

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

4.2.4.2 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi

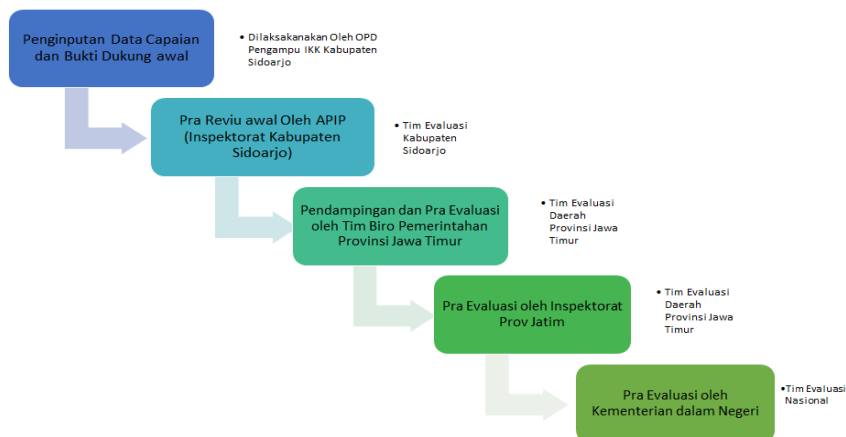
Adapun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo, Bagian pemerintahan selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menghimpun data yang bersumber dari PD Pelaksana Urusan Pemerintahan,

melainkan juga telah membentuk instrument pendampingan serta Pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan telah di bakukan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidoarjo, Adapun dalam SOP tersebut, bagian pemerintahan telah meruntun mulai dari penginputan awal sampai dengan reuiu akhir oleh APIP dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Evaluator eksternal yang melaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi dipilih berdasarkan evaluator tingkat provinsi dan pusat yang dari tahun ke tahun melaksanakan evaluasi terhadap data capaian dan bukti dukung Kabupaten Sidoarjo, yang mana setiap tahun dilakukan penilaian namun penentuan yang bertindak menjadi evaluator masing-masing Kabupaten/Kota diacak yang bertindak sebagai evaluatornya, antara oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur. Adapun di tahun 2024 ini tidak di ikutsertakan BPKP selaku evaluator, dikarenakan sudah 3 tahun berturut-turut BPKP tidak ditunjuk sebagai evaluator bagi Kabupaten Sidoarjo. Pendampingan dan Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang “sebenarnya” dilakukan oleh Tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai, telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta nilai capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,

menggunakan strategi Pendampingan dan Pra-evaluasi, yakni melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah yang dinilai dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebelum Laporan di Kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat dan Daerah. Selain untuk meningkatkan kuantitas capaian Kinerja indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dengan dilakukan evaluasi dini oleh tim evaluator, diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas Bukti dukung yang valid sehingga bisa meningkatkan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo di tingkat Nasional. Adapun dalam kegiatan pendampingan dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan berjenjang, antara lain :

Gambar 4.13 Pola Jenjang Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap diawal tahun (n+1) atau setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemerintahan tepatnya di minggu pertama bulan januari, bagian pemerintahan melaksanakan pendampingan serta sosialisasi pengisian Website Portal Data Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan tata cara pengisian ian, menjelaskan apabila terdapat fitur baru ataupun staf inputing baru dari tiap-tiap perangkat daerah pengampu Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyampaian jadwal serta timeline rencana pelaksanaan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh TIM evaluator Internal maupun Eksternal. Berikut adalah timeline Pendampingan dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 4.10 Timeline Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dalam Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana		
		JANUARI					FEBRUARI				MARET					
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV	
1	Inputing Capaian Kinerja oleh PD pengampu urusan LPPD pada Website Portal Data Kinerja															PD pengampu LPPD
2	Pra-Reviu Oleh APIP Inspektorat															Inspektorat Kab. Sidoarjo

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana					
		JANUARI					FEBRUARI				MARET								
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV				
	Kabupaten Sidoarjo																		
3	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pra-Review Inspektorat																		PD pengampu LPPD
4	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur																		Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
5	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur																		PD pengampu LPPD
6	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur																		Inspektorat Provinsi Jawa Timur
7	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Timur																		PD pengampu LPPD
8	Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh																		Kementerian Dalam Negeri

NO	AKSI	WAKTU PELAKSANAAN												Pelaksana	
		JANUARI					FEBRUARI				MARET				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III		IV
	Kementerian Dalam Negeri														
9	Perbaikan oleh PD Pengampu LPPD atas hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Kementerian Dalam Negeri														PD pengampu LPPD
10	Finalisasi Reviu LPPD Oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo														Inspektorat Kab. Sidaorjo




Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

1. Inputing Capaian Kinerja oleh PD pengampu urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Website Portal Data Kinerja

Proses pengumpulan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidaorjo diawali dengan disampaikannya surat himbuan pengisian data dan bukti dukung capaian masing-masing urusan pada portal data kinerja, untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2023, surat himbuan sudah mulai di sampaikan pada 19 Desember 2023 dengan maksud agar Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD dapat segera menyusun data serta bukti dukung, sehingga pada awal tahun 2024, data dan bukti dukung tersebut dapat segera disampaikan melalui Website Portal Data Kinerja. Selain itu

disampaikan juga timeline pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Praevaluasi melalui surat tersebut.

Gambar 4.14 Surat Penyampaian Himbauan Pengisian Data LPPD Tahun 2023

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211 Telepon. (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145 Email : setda@sidoarjo.kab.go.id Website : www.sidoarjo.kab.go.id</p>	<p>Sidoarjo, 19 Desember 2023 Kepada Yth. Sdr.(sebagaimana Terlampir) di SIDOARJO</p> <p>Nomor : 100/15038/438.1.1.1/2023 Sifat : Penting Lampiran: 1 Perihal : himbauan pengisian portal data kinerja terkait capaian kinerja LPPD Tahun 2023</p> <p>Berkenaan dengan akan berakhirnya masa anggaran Tahun 2023 maka mohon kiranya saudara dapat mengisi hasil capaian kinerja tahun 2023 pada aplikasi https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id Adapun maksimal waktu pengisian capaian kinerja Tahun 2023 pada aplikasi tersebut, tanggal 7 Januari 2024, adapun data yang memakai data BPS yang belum release memakai data tribulan terakhir sedangkan data keuangan bisa menggunakan data unaudited.</p> <p>Dan dalam rangka tertib administrasi untuk pengisian LPPD capaian kinerja Tahun 2023, OPD pengampu wajib menyertakan data dukung ditandatangani oleh Kepala OPD sedangkan untuk surat keterangan nihil ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>Demikian untuk menjadi perhatian.</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH Ditandatangani secara elektronik oleh  ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE NIP.197009261990031005 ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE Pembina Utama Muda NIP.197009261990031005</p>	<p>Lampiran : Nomor : 100/15038/438.1.1.1/2023 Tanggal : 19 Desember 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektorat 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. BPBD 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tenaga Kerja 13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana 14. Dinas Pangan dan Pertanian 15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18. Dinas Perhubungan 19. Dinas Komunikasi dan Informatika 20. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22. Dinas Kependudukan, Olah Raga dan Pariwisata 23. Kantor Perpustakaan dan Arsip 24. Dinas Perikanan 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 26. Bagian Pengadaan <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH Ditandatangani secara elektronik oleh  ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE NIP.197009261990031005 ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE Pembina Utama Muda NIP.197009261990031005</p>
--	--	---

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2. Pra-Review Oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang pertama dilaksanakan adalah Pra-reviu yang dilaksanakan oleh Tim APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Adapun pelaksanaan Pra-reviu dilaksanakan pada bulan Januari, sesaat setelah dilakukan pengisian data dan bukti dukung

pada Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam pelaksanaan Pra-reviu, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan reviu secara tertulis kepada inspektur Kabupaten Sidoarjo agar dapat menugaskann Tim APIP dalam melaksanakan reviu dimaksud.

Gambar 4.15 Surat Permohonan Pra-reviu oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melaiu Website Portal Data Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145
Email : selda@sidoarjokab.go.id Website :www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten
Sidoarjo
di
SIDOARJO

Nomor : 100/819/438.1.1.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : permohonan pra reviu melalui aplikasi portaldata dan reviu di aplikasi SILPPD

Dalam rangka peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam Pelaporan Kinerja Daerah, maka perlu dilakukan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) hasil capaian kinerja tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pra-reviu agar dijadwalkan pada tanggal 22 s/d 28 Januari 2023 melalui portaldatakerja dengan *username* inspektorat *password* verifikasi dan pelaksanaan reviu LPPD pada tanggal 25 s/d 30 Maret 2023 melalui SILPPD Kemendagri.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Ditandatangani secara elektronik oleh
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. 197009261990031005
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 19700926 199003 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/Esensi/ndang/Indang/Indang No 11 Tahun 2008 menggunakan standar X.509, untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai elektronik yang sah

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Adapun berdasarkan Surat permohonan Pra-reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo,

untuk pelaksanaan Pra-reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 22-28 Januari 2024, mendasari pengisian data dan bukti dukung awal yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kegiatan Pra-reviu sendiri dilaksanakan langsung melalui Portal Data Kinerja, karena telah tersedia menu Reviu bagi Inspektorat untuk melakukan penilaian (OK atau TIDAK OK) berdasarkan data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Gambar 4.16 Fitur Reviu APIP di Website Portal Data Kinerja

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN	KET	DIPERBARUI	FILE	BUKTI	STATUS	AKSI
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PKUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PKUD	57385 100%	100%	20-02-2024	1305-00000000	20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi, Uplod, Status Verifikasi, Hapus
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	182521 100%	99,75%	20-02-2024	1377-00000000	20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi, Uplod, Status Verifikasi, Hapus
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	95547 100%	99,89%	20-02-2024	1380-00000000	20-02-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: OK	Verifikasi, Uplod, Status Verifikasi, Hapus
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	4617 100%	99,99%	25-03-2024	1381-00000000	25-03-2024	Sudah diverifikasi Status APIP: Belum	Verifikasi, Uplod, Status Verifikasi, Hapus

Sumber : Website Portal Data Kinerja

Setelah dilakukan reviu di Website Portal Data Kinerja, Bagian Pemerintahan selanjutnya melakukan penyampaian hasil Pra-reviu Kepada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui data tertulis atau melalui surat kepada masing-masing Perangkat Daerah. Berikut adalah hasil dari prareviu yang dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.17 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 22 Januari 2024

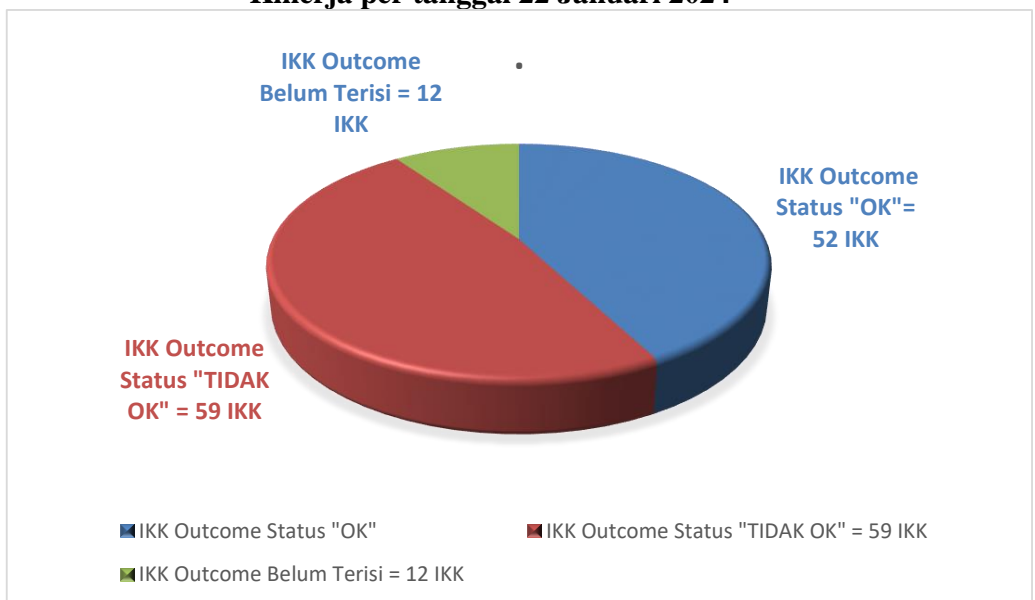


Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang harus diisi oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, baru 111 IKK Outcome atau 90 persen dari serta bukti dukung yang telah di isikan pada Website Portal Data Kinerja, Dimana data yang telah masuk tersebut yang selanjutnya di reviu oleh Tim APIP Inspektorat.

Tim Reviu APIP mengecek data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), adapun yang di cek antara lain, kesesuaia Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Permendagri yang mengatur Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perakgkat Daerah pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Berikut adalah hasil reviu yang dilakukan oleh Tim APIP Inspektorat :

Gambar 4.18 Hasil Pra-reviu Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 22 Januari 2024



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dari 111 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, baru sebanyak 52 IKK Outcome atau 42,3% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 71 atau 57,7% masih berstatus “BELUM OK” dari 71 Indikator tersebut, 12 diantaranya dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada website portal data kinerja, dan 59 lainnya belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Gambar 4.19 Surat Penyampaian hasil Pra-reviu oleh inspektorat



Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Untuk data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar yang belum sesuai, Inspektorat melalui Portal Data Kinerja memberikan keterangan “TIDAK OK” dan Keterangan perihal Dimana letak kekeliruan maupun Upaya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dapat melakukan perbaikan serta peningkatan capaian data untuk selanjutnya dilakukan penginputan ulang pada Website Portal Data Kinerja.

3. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan setelah dilakukan perbaikan terhadap data hasil pra-reviu oleh tim APIP inspektorat yang “BELUM OK” adalah Pendampingan dan Pra-evaluasi data yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku tim evaluator daerah provinsi. Sesuai dengan timeline yangtelah disusun oleh bagian pemerintahan, Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan pada bulan Februari, sesaat setelah dilakukan perbaikan data dan bukti dukung berdasarkan hasil pra-reviu tim APIP inspektorat pada Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Sama dengan pelaksanaan Pra-reviu, sebelum dilaksanakan Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melakukan permohonan reviu secara tertulis kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat menugaskan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan praevaluasi dimaksud.

Gambar 4.20 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Lampiran :


Jadwal Pra Evaluasi

No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Instansi
1	Pra-evaluasi oleh masing-masing perangkat daerah pemprov jatim per urusan yang dilakukan secara online melalui website https://portaldatakerja.sidoarjo.kab.go.id	Senin - Selasa	19 - 21 Februari 2024	Kantor masing-masing PD Pemprov Jatim	PD Pemprov Jatim
2	Pengiriman "hasil" pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatim kepada perangkat daerah pembk sidoarjo per urusan dalam bentuk asistensi	Rabu - Kamis	22 Februari 2024	Kantor Biro Adm. Pemerintahan dan Otda	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektorat 4. Badan Kepegawaian Daerah 5. BPBD 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tenaga Kerja 13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana

3	Pengiriman hasil pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatim kepada perangkat daerah pembk sidoarjo per urusan dalam bentuk asistensi		23 Februari 2024	Kantor Biro Adm. Pemerintahan dan Otda	1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8. Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip 11. Dinas Perikanan 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Bagian Pengadaan
---	--	--	------------------	--	--

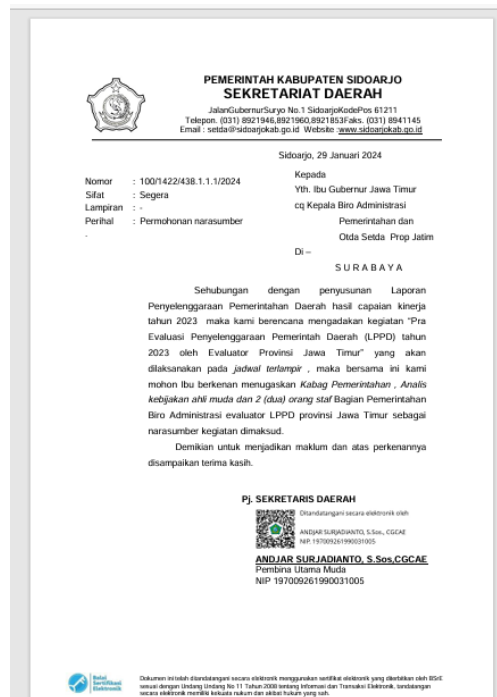
NB : username dan password akan kami kirim via WA ke salah satu staf biro adm. Pemerintahan dan otda sda pemprov jatim

PJ. SEKRETARIS DAERAH



Diandatangani secara elektronik oleh
ANDJAR SURJADANTO, S.Su., CGCAE
 NIP. 197009261990021005

ANDJAR SURJADANTO, S.Sos.CGCAE
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 197009261990021005

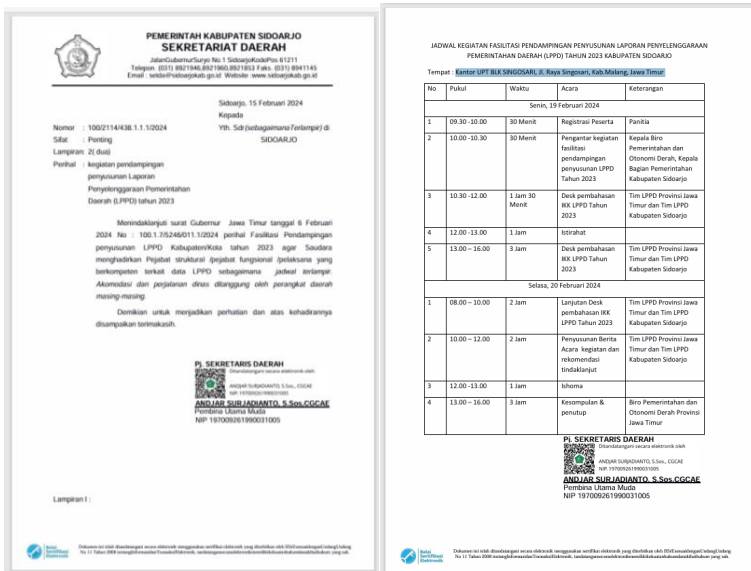


Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berbeda dengan Pra-reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, jika tim APIP melakukan pra-reviu online, tanpa tatap muka dan penyampaian dilakukan melalui Website Portal Data Kinerja dan melalui penyampaian surat kepada seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan metode desk langsung dan tatap muka. Adapun Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menghadirkan seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di tingkat

Provinsi Jawa Timur untuk melakukan desk langsung dengan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo, untuk media penyampaian hasil evaluasi tetap melalui Website Portal Data Kinerja dan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur membuat Berita Acara penyampaian Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi dan rekomendasi dari desk yang dilaksanakan. Berdasarkan arsip surat yang ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Biro Pemerintaahn Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari senin dan selasa, 19-20 Februari 2024 bertempat di Kantor UPT BLK Singosari, Jl. Raya Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur.

Gambar 4.21 Surat Undangan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.22 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

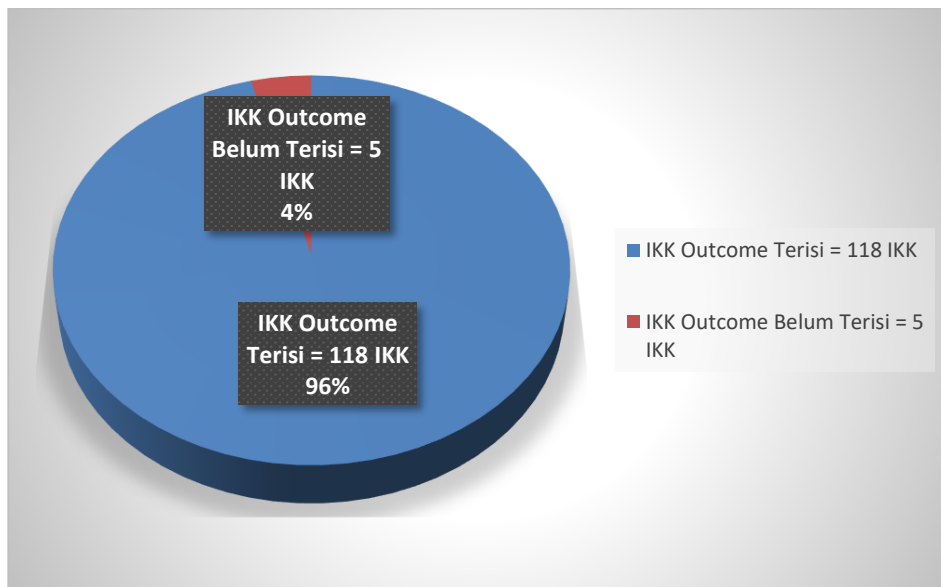


Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tidak berbeda dengan yang dilakukann Tim Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Tim evaluator dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga mengecek data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksan LPPD mendasari hasil pra-reviu oleh Tim APIP, adapun yang di cek antara lain, kesesuaia Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

dalam Permendagri yang mengatur LPPD, Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Berikut adalah hasil reuiu yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.23 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidaorjo per tanggal 20 Februari 2024

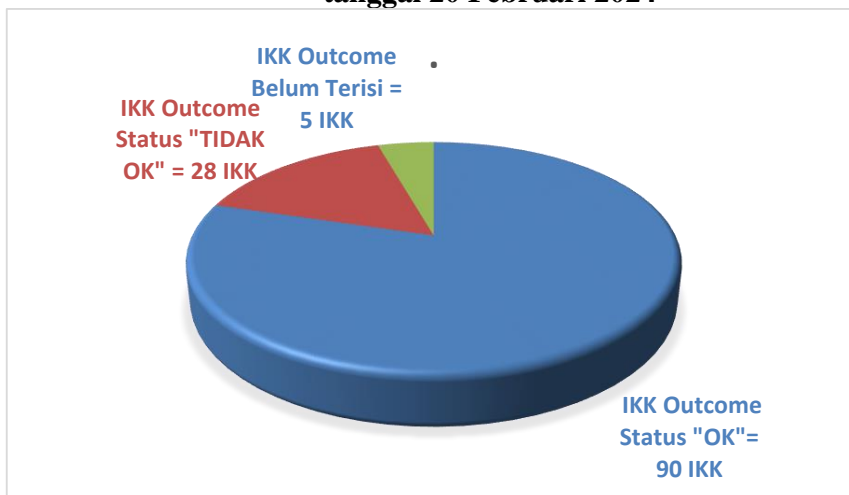


Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat peningkatan keterisian data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD di Kabupaten

Sidoarjo, yang sebelumnya saat Pra-reviu Tim APIP Kabupaten Sidoarjo dari 123 IKK Outcome terdapat 111 IKK Outcome yang sudah terisi, dan 12 IKK Outcome yang belum terisi, adapun setelah dilakukan reviu dan penyampaian rekomendasi oleh Tim APIP dan dilakukan Pra evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dari 123 IKK Outcome, terdapat 18 IKK Outcome yang sudah terisi dan sisanya sebanyak 5 IKK Outcome yang belum terisi. Adapun untuk Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing urusan, berikut adalah hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.24 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 20 Februari 2024



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dari 118 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD per tanggal 20 Februari 2024, sudah sebanyak 90 IKK Outcome atau 73,17% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 33 atau 26,83% masih berstatus “BELUM OK” dari 33 Indikator tersebut, 5 diantaranya dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada website portal data kinerja, dan 28 lainnya belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.


4. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Setelah Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo melakukan perbaikan terhadap IKK Outcome hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang “BELUM OK”. Sesuai dengan timeline yang telah disusun oleh bagian pemerintahan, selanjutnya dilakukan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Pra-evaluasi ini dilakukan sesaat setelah dilakukan perbaikan data dan bukti dukung oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD berdasarkan hasil pra-reviu tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur secara tatap muka dan desk pada Tanggal 19-20

Februari 2024 yang hasil evaluasinya disampaikan ke Perangkat Daerah Pelaksana LPPD Kabupaten Sidoarjo melalui Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

Sama dengan pelaksanaan Pra-Review Tim APIP Kabupaten Sidoarjo dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dengan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sebelum dilaksanakan Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan review secara tertulis kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur agar dapat menugaskan Evaluator LPPD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan praevaluasi dimaksud


Gambar 4.25 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>Jalan Gubernur Suryo No 1 Sidoarjo Kode Pos 61211 Telepon : (031) 8921846-8921960-8921853 Fax. : (031) 8941145 Email : selda@sidoarjab.go.id Website : www.sidoarjab.go.id</p>	
Sidoarjo, 19 Februari 2024	
Nomor : 100/2252/438.1.1.1/2024	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Inspektur Pemerintah
Lampiran : Tiga (3)	Provinsi Jawa Timur
Perihal : Permohonan narasumber	d -
	SURABAYA

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hasil capaian kinerja tahun 2023 maka kami berencana mengadakan kegiatan "Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2023 oleh Evaluator Provinsi Jawa Timur" yang akan dilaksanakan pada *jadwal terlampir*, maka bersama ini kami mohon Saudara berkenan menugaskan 3 (tiga) orang auditor sebagai narasumber kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH



 Dikandatangani secara elektronik oleh
ANDJAR SURJADANTO, S.Sos., CGCAE
 NIP. 197009261990031005
ANDJAR SURJADANTO, S.Sos., CGCAE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197009261990031005


 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penandatanganan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran

Jadwal Pra Evaluasi					
No	Kegiatan	Hari	Tanggal	Tempat	Instansi
1	Pra-evaluasi oleh auditor per urusan yang dilakukan secara online melalui website Mps (portaldatakinerja.sidoarjo.go.id)	Senin - Selasa	28 - 29 Februari 2024	Kantor Inspektoral jatin	Inspektoral Pemprov Jatin
2	Penyampaian hasil pra-evaluasi inspektoral pemrov jatin kepada perangkat daerah pemkab sidoarjo per urusan dalam bentuk sistematika	Rabu - Kamis	4 - 5 Maret 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Inspektoral 4. Badan Pengawasan Daerah 5. SPMD 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Kesehatan 8. Dinas Pekerjaan Umum Dina Marga dan Sumber Daya Air 9. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata ruang 10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 11. Dinas Sosial 12. Dinas Tanggapdar 13. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana
3	Penyampaian hasil pra-evaluasi dari perangkat daerah Pemprov Jatin kepada perangkat daerah pemkab sidoarjo per urusan dalam bentuk sistematika		5 - 6 Maret 2024	Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan dan Pertanian 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8. Dinas Perencanaan Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Kepemukiman, Jalan Raya dan Perilaku 10. Kantor Perputakaan dan Arup 11. Dinas Peternakan 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13. Dinas Perdagangan

NB : username dan password akan kami kirim via WA ke salah satu staf biro adm. Pemerintahan dan oleh esdta pemprov jatin

PI SEKRETARIS DAERAH
SEKREJATI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

ANDJAN SURJAMANTO, S.Sos.CCAGAE
Pemkab. Sidoarjo
 NIP 19709261990031005

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektoral Provinsi Jawa Timur hampir sama dengan Pra-reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP Inspektoral Kabupaten Sidoarjo, yakni melakukan pra-reviu online, tanpa tatap muka dan penyampaian dilakukan melalui Website Portal Data Kinerja. Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Inspektoral Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, 28-29 Februari 2024, dilakukan secara online Website Portal Data Kinerja.

Inspektorat Provinsi Jawa Timur, melakukan evaluasi berdasarkan hasil inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yakni data cut-off 27 Februari 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.26 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo per tanggal 20 Februari 2024

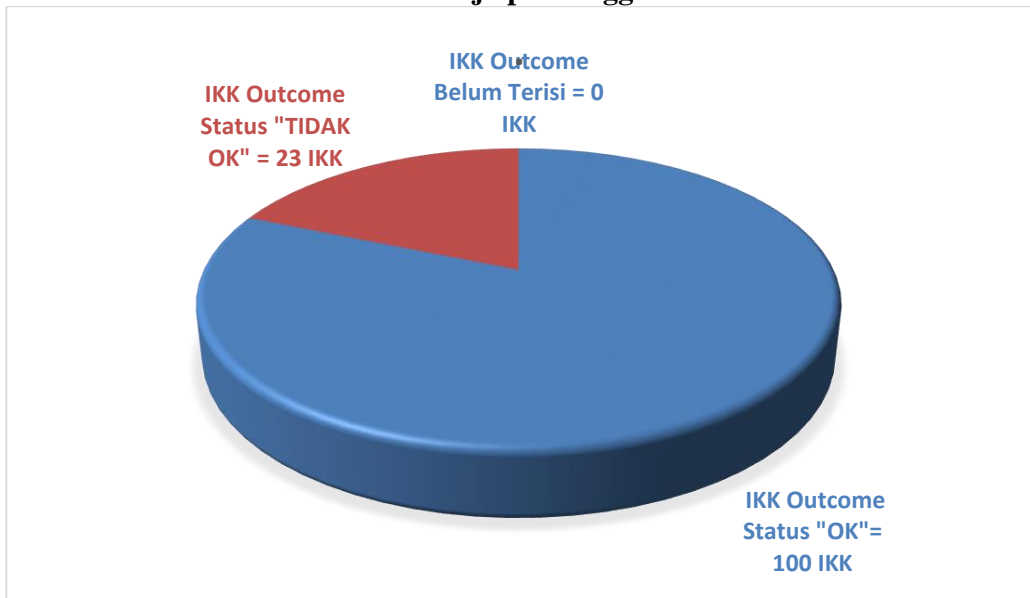


Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan penginputan data dengan maksima, terlihat dari sudah 100% atau sebanyak 123 IKK Outcome telah diinputkan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang

telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing urusan, berikut adalah hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.27 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 28 Februari 2024



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dari 123 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD per tanggal 28 Februari 2024, sudah sebanyak 102 IKK Outcome atau 82,9% yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri yang selanjutnya oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 21 atau 17,1%

masih berstatus “BELUM OK” dikarenakan belum sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.

Penyampaian hasil dari Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur disampaikan melalui Website Portal Data Kinerja, adapun Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD melakukan percepatan serta pengoptimalan bagi IKK Outcome yang berstatus “BELUM OK” dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait untuk dilakukan Desk untuk mengetahui Kendala dalam mengumpulkan data dan bukti dukung.

Penyampaian hasil Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui Rapat pengoptimalan data serta bukti dukung, yang dilaksanakan pada hari jumat, 1 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat Delta Praja Sekterariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. dengan menghadirkan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD yang masih berstatus “BELUM OK” dan dilakukan penyampaian oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, berikut adalah dokumentasi kegiatan rapat :

Gambar 4.28 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur





Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

5. Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim Evaluator Nasional yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Pendampingan dan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Nasional yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi terkahir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum dilakukan Reviu akhir oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Tidak berbeda denga Pendampingan dan Pra-reviu yang dilaksanakan sebelumnya, sebelum dilakukan Pendampingan dan Pra-evaluasi, Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Pemerintahan selaku sekretariat pelaporan LPPD menyampaikan surat permohonan Pendampingan dan Pra-evaluasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah, agar dapat menugaskan Evaluator LPPD Nasional Wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan pendampingan dan praevaluasi dimaksud.

Gambar 4.29 Surat Penyampaian Permohonan Pendampingan dan Pra-evaluasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH</p> <p><small>Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 81211 Telepon. (031) 8921046, 8921980, 8921853 Faks. (031) 8941145 Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id</small></p>
Sidoarjo, 21 Februari 2024	
<p>Nomor : 100/2314/438.1.1.1/2024 Sifat : Penting Lampiran : - Hal : Permohonan narasumber</p>	<p>Kepada Yth. Bpk. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cq. Pih. Direktur Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah</p>
J A K A R T A	
<p>Sehubungan dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hasil capaian kinerja tahun 2023 tahun anggaran 2024 maka kami berencana mengadakan kegiatan "Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) hasil kinerja tahun 2023" adapun kegiatan pra evaluasi akan kami lakukan dalam bentuk evaluasi capaian kinerja IKK Outcome dan output dan penyampaian hasil evaluasi dalam sebuah kegiatan dalam bentuk FGD antara evaluator kemendagri dan seluruh perangkat daerah di kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Maret Tahun 2024 melalui website portaldatakerja dengan username : kemendagri, password : sidoarjokab dan penyampaian hasil pra evaluasi oleh evaluator kemendagri kepada seluruh perangkat daerah dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 melalui zoommeeting maka bersama ini kami mohon Saudara menugaskan pejabat/staf yang menangani evaluasi satu orang pejabat eselon 3, satu orang pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda dan 2 (dua) orang staf yang membidangi Kebijakan LPPD sebagai narasumber kegiatan dimaksud</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.</p>	
<p>Pj. SEKRETARIS DAERAH</p> <p> Ditandatangani secara elektronik oleh ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGAE NIP. 197009261990031005 ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGAE Pembina Utama Muda NIP.197009261990031005</p>	

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) berbeda dengan pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Daerah. Kegiatan Pra-evaluasi dilaksanakan secara online melalui website portal data kinerja adapun penyampaiannya kepada Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dilaksanakan secara Hybrid yakni menggabungkan peserta yang hadir secara fisik dengan peserta yang berpartisipasi dari jarak jauh. Teknologi konferensi audio dan video dalam hal ini zoom meeting digunakan untuk mengaktifkan koneksi antara kedua grup peserta. Jadi, dalam rapat hibrida, beberapa peserta berada di lokasi fisik yang sama, sementara yang lainnya mengikuti rapat melalui perangkat komunikasi online. Pada kegiatan penyampaian ini, Perangkat Daerah diundang oleh Bagian Pemerintah untuk mengikuti kegiatan pra-evaluasi secara langsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo, dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) menyampaikan hasil pra-evaluasinya melalui media zoom meeting . Data dan Bukti Dukung yang di evaluasi tersebut merupakan hasil inputan perangkat daerah pelaksana LPPD yang sudah dioptimalkan berdasarkan hasil pendampingan dan pra-evaluasi dari Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo, Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Timur cut-off 6 Maret 2024.

Sesuai dengan surat permohonan pendampingan dan Pra-evaluasi, kegiatan pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat

Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Maret, adapun untuk kegiatan pendampingan dan penyampaian hasil Pra-evaluasi yang seharusnya dilaksanakan pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diundur menjadi tanggal Jumat, 15 Maret 2024, berikut adalah dokumentasi dan hasil rapat pendampingan dan pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD).

Gambar 4.30 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) secara *Hybrid*

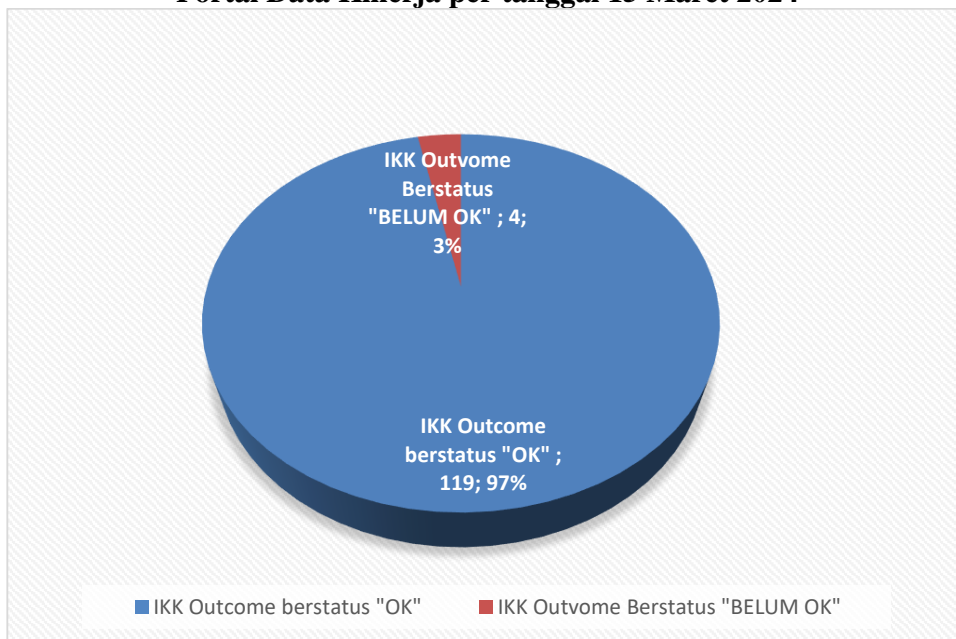


Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan pra-evaluasi yang dilakukan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sudah dilakukan pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah 123 IKK Outcome yang terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi data serta bukti dukungannya.

Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) melakukan evaluasi berdasarkan hasil inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo dan Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provisni Jawa Timur, yakni data cut-off 6 Maret 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD)

Gambar 4.31 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan Oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per tanggal 15 Maret 2024



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

6. Review LPPD yang dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan surat permohonan Reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, untuk pelaksanaan reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan melalui SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yakni website pelaporan LPPD yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan reviu dilakukan pada tanggal 25-30 Maret 2024, berdasarkan data capaian serta bukti dukung yang sebelumnya telah di pra-reviu oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, dan dilakukan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektortat Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD). Adapun yang bertugas menginput data yang telah disesuaikan dengan hasil pendampingan serta pra-evaluasi tersebut dari Website Portal Data Kinerja ke website SILPPD adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan pra-evaluasi yang dilakukan sampai dengan pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sudah dilakukan pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah 123 IKK Outcome yang

terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi data serta bukti dukungnya.

Hasil pelaksanaan Reviu APIP disampaikan melalui Catatan Hasil Reviu (CHR) yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo Kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari tanggal yang ditentukan untuk dilaksanakan Reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo yakni 25-30 Maret 2024. Inspektorat telah menyelesaikan reviu LPPD dimaksud pada tanggal 27 Maret 2024, dan di tanggal 28 Maret sduah diterbitkan CHR terhadap LPPD Tahun 2023, berikut adalah catatan hasil Reviu :

Gambar 4.32 Finalisasi Catatan Hasil Reviu (CHR) tim APIP insepktorat Kabupaten Sdoarjo terhadap Data dan Bukti Dukung LPPD Tahun 2024 pada Website SILPPD Kementerian Dalam Negeri

CATATAN HASIL REVIU	
<p>Selanjutnya dengan Surat Perintah Tugasi dari Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor 7961.3/700438.4/2024 Tanggal 8 Maret 2024 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:</p>	
<p>Unit dan Catatan Hasil Reviu</p>	
<p>Penyempurnaan LPPD sebagai:</p>	
1. Penyempurnaan SKL	KKR/0
<p>Dalam LPPD, SKL disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah</p>	
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja	KKR/0
<p>SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data laporan LPPD, Penyusunan LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD. Adapun, Tim Reviu LPPD beranggotakan 06 (enam) orang sebagai berikut:</p>	
3. Metodologi Pengukuran Kinerja	KKR/0
<p>Metodologi Pengukuran Kinerja sesuai dengan SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data laporan LPPD, Penyusunan LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dimana sumber informasi data yang digunakan dalam LPPD dan indikator dan perangkat daerah yang memilikinya untuk penyusunan LPPD, dan untuk hasil reviu, maka dapat dilihat pada catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>	
4. Analisis, Pembahasan, dan Interpretasi Kinerja	KKR/0
<p>Analisis, Pembahasan dan Interpretasi kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan SKL hasil masing-masing Perangkat Daerah yang sudah dibuat</p>	

Catatan Hasil Reviu (CHR) Tim APIP	
<p>Selanjutnya dengan Surat Perintah Tugasi dari Inspektur Kabupaten Sidoarjo Nomor 7961.3/700438.4/2024 Tanggal 8 Maret 2024 untuk melaksanakan Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:</p>	
<p>Unit dan Catatan Hasil Reviu</p>	
<p>Penyempurnaan LPPD sebagai:</p>	
1. Penyempurnaan SKL	KKR/0
<p>Dalam LPPD, SKL disusun sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah</p>	
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja	KKR/0
<p>SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data laporan LPPD, Penyusunan LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD. Adapun, Tim Reviu LPPD beranggotakan 06 (enam) orang sebagai berikut:</p>	
3. Metodologi Pengukuran Kinerja	KKR/0
<p>Metodologi Pengukuran Kinerja sesuai dengan SCP Prinsip Inventarisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 189/708438.1.1.3/2022 tanggal 02 Juni 2022, yang merupakan inventarisasi data laporan LPPD, Penyusunan LPPD, Instruksi dan Rencana Aksi LPPD, dimana sumber informasi data yang digunakan dalam LPPD dan indikator dan perangkat daerah yang memilikinya untuk penyusunan LPPD, dan untuk hasil reviu, maka dapat dilihat pada catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>	
4. Analisis, Pembahasan, dan Interpretasi Kinerja	KKR/0
<p>Analisis, Pembahasan dan Interpretasi kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan SKL hasil masing-masing Perangkat Daerah yang sudah dibuat</p>	

2) Unsur Kesehatan

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Penyakit Menular	Penyakit Menular	100%	100%	100%
2	Penyakit Tidak Menular	Penyakit Tidak Menular	100%	100%	100%
3	Penyakit Infeksi	Penyakit Infeksi	100%	100%	100%
4	Penyakit Parasetamol	Penyakit Parasetamol	100%	100%	100%
5	Penyakit Demam Berdarah Dengue	Penyakit Demam Berdarah Dengue	100%	100%	100%

3) Unsur Perumahan

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

3) Unsur Pekerjaan Umum

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

4) Unsur Perumahan Rakyat

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

5) Bidang Unsur Kebencanaan, Kesehatan Unsur dan Perilaku Masyarakat

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

6) Sifat

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

6) Sifat

No	Program Kerja	Indikator	Target	Realisasi	Penyakit
1	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
2	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
3	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
4	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%
5	Perumahan	Perumahan	100%	100%	100%

<p>4) Analisis, Pembinaan dan Interpretasi Kinerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memfungsikan IKK hasil monitoring Pengabdian Desa yang sudah dibuat</p> <p>2). Keaslian Matrik LPD sudah sesuai</p> <p>Matrik LPD secara garis besar sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Pertanggungjawaban pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Efisiensi No.5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kinerja Pemerintah Daerah, serta diutamakan penulisan sudah digambarkan Bab per Bab sesuai Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V, namun selanjutnya perlu diutamakan penulisan bab Bab sesuai pedoman.</p> <p>3). Keaslian Sistematis LPD</p> <p>Kemudian diteliti secara garis besar telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan Dan Pertanggungjawaban pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Efisiensi No.5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kinerja Pemerintah Daerah, serta diutamakan penulisan sudah digambarkan Bab per Bab sesuai Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V, namun selanjutnya perlu diutamakan penulisan bab Bab sesuai pedoman.</p> <p>2. Penyajian atau Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>a. Capaian Kinerja Makro</p> <p>berdasarkan review melalui https://kemdagri.go.id dan 6 (enam) RK Makro tahun 2023 tidak ada capaian yang tidak berturut-turut OK.</p> <p>b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>1) Laporan realisasi RK Kabupaten Sidoarjo sebanyak 123 IKK, salah satunya OK sebanyak 122 IKK, direvisi melalui https://kemdagri.go.id dengan:</p> <p>2) Babur nilai perbandingan urusan pemerintahan (lampiran 2)</p> <p>3) Babur capaian kinerja RK nilai perbandingan urusan pemerintahan (lampiran 3)</p> <p>4) Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan Capaian indikator kinerja per urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berturut-turut, di revisi melalui portaldata.kemdagri.go.id selengkapnya akan diupload terupdate, menggunakan hal yang perlu dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti.</p> <p>1. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah terdapat dalam Bab B. 3 Rancangan Awal LPD Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan IE MERNYAN RB No. 5 Tahun 2021 tentang Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah nomor 1 huruf C bahwa Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah mencakup Perencanaan dan Capaian Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dapat diimpikan bahwa capaian dari 6 tujuan dengan 3 indikator Tujuan, secara keseluruhan indikator dalam kategori Sangat Baik. Jika dirata-</p>	<p>rata capaian kinerja tujuan tersebut tercapai 117,78% atau Sangat Baik. Selanjutnya dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran, ada 26 (dua puluh enam) indikator sasaran dinilai Sangat Baik, 1 (satu) indikator yang belum dinilai, hal-hal yang Kementerian atau lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilaian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 103,20% atau dalam kategori Sangat Baik. Jika dilihat dari ketepatan tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 110,49%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Sangat Baik.</p> <p>4. Tindak lanjut</p> <p>Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan Program dan Kegiatan yang merupakan bagian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugan Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didatangi dari Pemerintah Pusat berupa: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKU). Selanjutnya untuk Program, selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan Tugan pembantuan secara khusus kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKU). Bantuan ini dimaksudkan untuk memperlancar kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Kegiatan yang merupakan Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digotong melalui kegiatan Moerwaringin.</p> <p>5. Penyajian Perencanaan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal</p> <p>Diupload dalam Bab IV rancangan dokumen LPD, dengan ketentuan : Dari 6 urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, Bidang Urusan Ketertanian, Kertanian Urusan dan Perindrihan Masyarakat dan Social, capaiannya sudah 100%.</p> <p>Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Dimulai</p> <p>Atau ketambahan-ketambahan tersebut diatas, telah kami komunikasikan dan kami sampaikan kepada Tim Penyusun LPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal LPD dengan melakukan perbaikan sebagai berikut:</p> <p>a. Keaslian matrik dan sistematis drif LPD</p> <p>Selanjutnya penomoran bab Bab diuraikan Pedoman Penyusunan LPD</p>
---	---

4. Capaian Kinerja Makro

Melakukan perbaikan LPD Tahun 2023 Bab 6.1 pada RK Makro, ketepatan Perencanaan Tahun 2023 atau 0,00% sesuai hasil data yang

4. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah -
Melakukan perbaikan LPD Tahun 2023 Bab 3 pada saat saat penyusunan Capaian RI sesuai dengan RK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Kemudian Pengantar

Azon kami tidak lanjut

Jakarta 18 Maret 2024

TIM PENYUSUN LPD
Wakil Pemangkas Daerah

TIM BERSU
1. Yana Budha, STP, M.Si
2. Yana Nurka Samudri, S.Kom, S.H
3. D. Indraya P.T.A, M.M.A
4. Nur Hafidza, S.E
5. Nurfa Nurfa, A.Md
6. Rizki Andika, A.Md

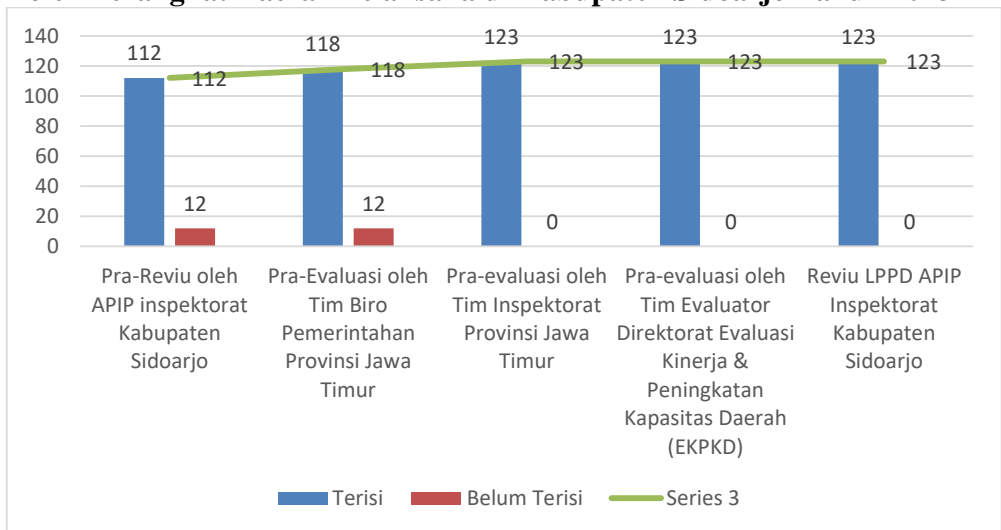
Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil Catatan Hasil Reviu tersebut bahwasanya dari 123 IKK Outcome yang diampu dan sudah diisi data serta bukti dukungnya oleh Kabupaten Sidoarjo, sudah 123 IKK yang berstatus “OK”. Dimana berarti sudah 100% IKK Outcome sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala

perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendagri LPPD.

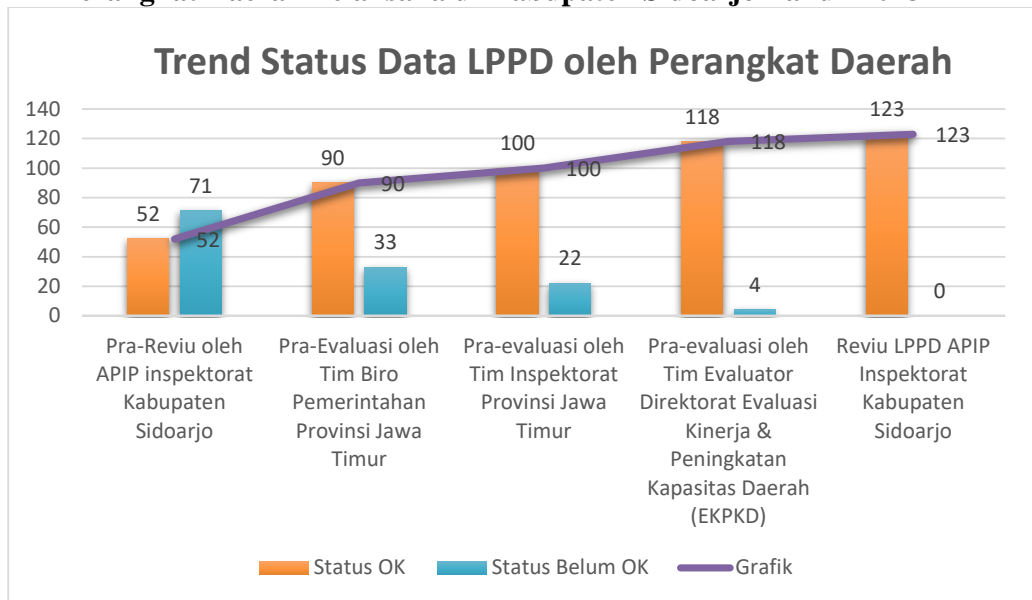
Selanjutnya dilakukan kompilasi serta penelaahan data capaian serta data dukung mulai dari data awal yang pertama kali dilakukan Pra-reviu oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada Website Portal Data Kinerja, dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektortat Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sampai dengan terlaksanaakannya finalisasi pelaksanaan Reviu LPPD oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo pada website SILPPD Kementerian Dalam Negeri, Berikut adalah trend keterisian data LPPD di Kabupaten Sidoarjo :

Gambar 4.33 Grafik Trend Keterisian Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Gambar 4.34 Grafik Trend Status Data dan Bukti Dukung LPPD oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa baik keterisian data Terus meningkat seiring dengan dilakukannya pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tiap-tiap evaluator. Mulai yang awalnya saat kegiatan Pra-reviu hanya terisi sebanyak 112 dari 123 IKK Outcome yakni 91% terisi, namun dengan dilakukannya pendampingan dan pra-evaluasi LPPD sudah 123 IKK Outcome yang terisi, sehingga pada finalisasi Reviu LPPD, Keterisian data menjadi menjadi 100%. Sedangkan untuk status Kinerja LPPD juga menunjukkan adanya peningkatan data capaian yang signifikan, karena diawal hanya terdapat 52 dari 123 IKK outcome yakni 42,27% yang sudah sesuai data serta bukti dukungunya dengan status “OK”, namun dengan dilakukan pendampingan pra-evaluasi LPPD,

keseluruhan IKK Outcome sudah yakni 123 IKK atau 100% sudah sesuai data serta bukti dukungnya dan mendapat status “OK” dari TIM APIP.

Begitupula dengan indeks capaian masing-masing indikator yang selama pendampingan dan pra-evaluasi oleh Tim evaluator daerah dan Nasional juga mengalami peningkatan, karena memang saat dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi bukan hanya dilakukan evaluasi terhadap data yang telah di input melainkan juga disampaikan bagaimana data yang di inputkan dapat meningkat kuantitas dan kualitasnya. Tim evaluator daerah dan nasional tentu sudah mengetahui bagaimana seharusnya data dari tiap-tiap indikator disajikan, sehingga selain menjelaskan kepada Perangkat Daerah Pelaksana LPPD adanya indikator dan data dukung yang belum sesuai juga memberikan masukan mengenai kiat-kiat serta data apa yang seharusnya digunakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD untuk meningkatkan capaian LPPD yang dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Berikut adalah hasil dari masing-masing pendampingan dan pra-evaluasi berdasarkan Urusan dan Capaian yang diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

Tabel 4.11 Tabel hasil capaian dari kegiatan Pra-reviu serta pendampingan dan evaluasi oleh evaluator internal dan eksternal

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	109.03 %	109.03 %	100.00 %	100.00 %
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	108.87 %	108.87 %	99.75 %	99.75 %
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	117.57 %	117.57 %	99.89 %	99.89 %
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	63.67 %	63.67 %	100.00 %	100.00 %
5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0.15 %	0.15 %	0.15 %
6	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.68 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
7	Persentase penderita DM yang mendapatkan	98.60 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	pelayanan kesehatan sesuai standar				
8	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	108.81 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
9	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	146.16 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
10	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84.78 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
11	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	67.21 %	86.89 %	100.00 %	100.00 %
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99.57 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.90 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
14	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	103.58 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
15	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95.12 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
16	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
17	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.32 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
18	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99.88 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
19	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	%	100%	100%
20	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	85.66 %	85.66 %	85.66 %	85.66 %
21	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota				
22	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	97.55 %	97.55 %	97.55 %	97.55 %
23	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	%	43.23 %	100.00 %	100.00 %
24	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98.81 %	98.81 %	98.81 %
25	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
26	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	97.35 %	97.35 %	97.35 %	97.35 %
27	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	%	%	89.30 %
28	Rasio proyek yang menjadi kewenangan	%	%	%	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
29	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
30	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	%	%	%	100%
31	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	44.51 %	80.38 %	80.38 %
32	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0.21 %	0.00 %	0.00 %
33	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
34	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
35	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	78.67 %	78.67 %	100.00 %	100.00 %
38	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
39	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	38.98 %	38.98 %	38.98 %	100.00 %
40	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				
41	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
42	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
43		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
44	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	62.39 %	62.39 %	62.39 %	62.39 %
45	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	14016.00 %	14016.00 %	14016000479.79 %	148791532.93 %
46	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	53.53 %	53.53 %	79.79 %	79.79 %
47	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	67.99 %	67.99 %	67.99 %	67.99 %
48	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	72.38 %	72.38 %	72.38 %	72.38 %
49	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.04 %	0.05 %	0.04 %	100.00 %
50		18.86	17.66	18.86	18.86

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
51	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.09 %	0.09 %	0.09 %	0.52 %
52	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	%	%	100.00 %
53	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	88.89 %	57.74 %	100.00 %
54	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	%	%	100.00 %
55	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100.00 %	100.00 %	3.89 %
56	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	13.22 %	13.22 %	13.22 %	10.17 %
60	Perekaman KTP Elektronik	99.89 %	99.89 %	99.89 %	99.89 %
62	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51.72 %	51.72 %	51.72 %	51.72 %
63	Kepemilikan akta kelahiran	98.20 %	98.20 %	98.20 %	98.20 %
64	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	77.78 %	77.78 %	77.78 %	77.78 %
65	TFR (Angka Kelahiran Total)				
66	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	70.59 %	70.59 %	70.59 %	70.59 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
67	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.23 %	8.23 %	8.42 %	8.42 %
68	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
69	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
70	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100.00 %	100.00 %
71	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	%	65.09 %	72.83 %
72	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	93.19 %	93.19 %	93.19 %
73		%	%	-2.87 %	-2.87 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota				
74	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2.23 %	2.23 %	52.11 %
75	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10.39 %	10.39 %	10.39 %	10.39 %
76	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
77	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
78	Tingkat keamanan informasi pemerintah	83.26 %	83.26 %	83.26 %	83.26 %
79	Terlestarikannya Cagar Budaya	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
80	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
81		100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
82	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
83	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
84	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %
85	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5.26 %	5.26 %	5.26 %	5.26 %
86	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	%	8.56 %	8.56 %
87	Rasio PAD	%	%	40.85 %	40.85 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
88	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
89	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
90	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	%	61.68 %	61.68 %
91	Opini Laporan Keuangan				
92	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama		0.00 %	0.00 %	0.00 %
93	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	0.00 %	1811.21 %	1811.21 %	1811.21 %
94	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	1931.46 %	67.84 %	67.84 %	67.84 %
95	Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Ne dan geri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan	67.84 %	9.69 %	9.69 %	9.69 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	barang/jasa pemerintah daerah				
96	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	9.69 %	145.15 %	59.15 %	59.15 %
97	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	145.15 %	27.25 %	27.25 %	27.25 %
98	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.25 %	79.44 %	79.44 %	79.44 %
99	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	%	=	=	27,20%
100	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	=	10.18 %	10.20 %	10.20 %
101	Assets Management			3	4
102	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total	10.18 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				
10 3	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
10 4	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00 %	99.17 %	99.17 %	99.17 %
10 5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	99.17 %	86.19 %	86.19 %	86.19 %
10 6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	86.19 %	68.13 %	68.13 %	68.13 %
10 7	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	65.47 %	100.00 %	58.21 %	58.21 %
10 8	Tingkat Hunian Akomodasi	100.00 %	%	%	3.54 %
10 9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	6.94 %	6.94 %	6.94 %
11 0		6.94 %	674.48 %	674.48 %	674.48 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
111	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1593.29 %	91.72 %	-91.72 %	61.89 %
112	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	91.71 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
113	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	%	100.00 %	100.00 %	100.00 %
114	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	84.79 %	84.79 %	84.79 %
115	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	100.00 %	118.88 %	118.88 %
116	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	0.83 %	0.83 %	0.83 %
117	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	%	100.00 %	100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
118	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	%	100.00 %	100.00 %
119	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	%	100.00 %	100.00 %
120	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%			100.00 %
121	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %

NO	IKK	Pra-Review Oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo	Pendampingan dan Evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pendampingan dan Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri
12 2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				100.00 %
12 3	Transmigrasi				100.00 %

Keterangan :



Capaian yang dapat ditingkatkan

Capaian yang disesuaikan dengan rumus indikator Urusan

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dalam pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi tidak hanya sekedar dilakuka koreksi terhadap data capaian serta kesesuaian bukti dukung yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana, melainkan dilakukan juga pendampingan yakni penjelasan tentang data yang sesuai dengan rumus indikator urusan dan upaya penyesuaian penghitungan bagaimana agar dapat ditingkatkan baik di tahun-n maupun maupun ditahun yang akan datang. Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang telah diisikan isikan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD dan setelah dilaksanakan Pendampingan serta Pra-evaluasi oleh Evaluator Daerah dan evalaustor nasional, dari terdapat 44 IKK Outcome yang telah berhasil dilakukan upaya peningkatan capaian dan 12 IKK telah di arahkan untuk menggunakan data capaian yang sesuai dengan yang diinginkan oleh indikator Urusan LPPD.

Hal tersebut merupakan strategi yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Dokumen LPPD, yang harapannya dari tahun ke tahun Status Kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Keberadaan Sekretariat Penyusunan LPPD dalam hal ini Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD, dan Tim evaluator baik internal maupun eksternal merupakan pilar utama dalam suksesnya penyelenggaraan LPPD di kabupaten Sidoarjo. Ketiga pilar tersebut harus memiliki koordinasi an sinergitas yang tinggi terkait berbagai aspek yang memastikan tersusunnya dokumen LPPD yang dapat dipertanggungjawabkan baik capaian serta data dukungannya.

Sesuai yang teori oleh Geoff mulgan (2009) berkaitan dengan indikator strategi, strategi yang baik harus memenuhi indikator-indikator yang merupakan bagian dari pelaksanaan strategi yakni :

1. Tujuan (*Purposes*)

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dilakukannya penelitian ini, bahwasanya tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mengatasi kendala-kendala penyusunan LPPD akibat dari adanya perubahan dasar pelaksanaan Penyusunan LPPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah, yang merubah hampir keseluruhan strusktur dari dokumen LPPD. Adanya penataan aparatur dalam hal ini berupa mutasi dan promosi juga menjadi

kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD, dikarenakan pergantian personil yang menangani penyusunan LPPD seringkali tidak dibarengi dengan transfer ilmu maupun pengetahuan dalam melaksanakan penyusunan data capaian serta data dukung yang diperlukan dalam penyusunan LPPD. Selain itu, penetapan target skor dan status LPPD yang telah disahkan dalam dokumen rencana aksi Dimana dalam tahun-ke tahun diharuskan mengalami peningkatan juga menjadi tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya yang sebutkan oleh Asmara Hadi, S.STP, M.AP Selaku Kepala Bagian Pemerintahan bahwa :

“Tujuan dari dilaksanakannya Strategi Penyusunan LPPD ini adalah agar pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi lebih efektif dan efisien”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan memanfaatkan segala sarana, prasarana, personal dan anggaran seefektif dan seefisien mungkin dengan hasil yang maksimal, agar kendala dalam penyusunan LPPD dapat di tekan ataupun dihilangkan.

2. Lingkungan (environment)

Indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (change of ambient condition) yang apabila di analisa dari dari

pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, grafik trend keterisian data dan status kesesuaian serta keabsahan data capaian dan data dukung yang telah diisikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, maka terdapat perubahan kearah yang positif, mulai dari keterisian data diawal yang hanya terisi 112 IKK Outcome yang terisi dan hanya terdapat 52 IKK Outcome yang telah sesuai data dan bukti dukungnya dari jumlah keseluruhan IKK adalah 123 IKK, yang mana setelah dilakukan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi bagi Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap masing-masing IKK Outcome Urusan yang ada, maka seluruh IKK Outcome yakni sebanyak 123 IKK telah dipenuhi data dan sesuai seluruh bukti dukungnya. Seperti halnya yang sebutkan oleh Mohammah Lukman Arif Selaku Analis Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pengaruh yang baik terhadap skor dan kinerja LPPD karena memudahkan pengumpulan data dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, diketahui bahwa strategi penyusunan LPPD berupa dibentuknya Sistem Informasi Portal Data Kinerja serta pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi telah memberikan

dampak positif bagi tim koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni peningkatan bagi peningkatan skor dan status kinerja LPPD.

3. Pengarahan (Direction)

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, pengarahan dilakukan sebagai upaya menggerakkan Perangkat Daerah untuk dapat mencapai tujuan yang dilaksanakan yakni peningkatan skor dan status kinerja LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Pengarahan terdiri dari Koordinasi, motivasi, Komunikasi dan Perintah. Yang mana Bagian Pemerintahan memiliki peran yang sangat penting selaku Sekretariat Penyusunan LPPD dalam melaksanakan setiap pelaksanaan pengarahan yang ada.

- a. Koordinasi dalam hal ini dilaksanakannya rapat berkala dalam proses penyusunan LPPD guna menginventarisasi kendala serta bagaimana Solusi yang sesuai dengan kendala tersebut
- b. Motivasi juga merupakan bentuk pengarahan yang diberikan oleh Bagian Pemerintahan kepada Perangkat Daerah pelaksana, motivasi diberikan setiap kali dilaksanakan tahapan pendampingan dan pra-evaluasi LPPD dengan membandingkan capaian tahun N dengan capaian N-1, sehingga perangkat daerah dapat membuat rencana aksi peningkatan capaian dari tahun ke tahunnya.
- c. Komunikasi yang dilakukan Bagian Pemerintahan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD dan evaluator

LPPD internal dan eksternal telah dibangun sedemikian rupa yakni melalui media website portal data kinerja, melalui zoom meeting, sarana konsultasi chat dan telepon dengan media komunikasi *whatsapp* dan juga tatap muka langsung melalui desk dan rapat-rapat lainnya, sehingga dalam penyampaian hasil evaluasi dapat diterima dengan baik oleh Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD .

- d. Perintah (Command) Perintah dalam pelaksanaan Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan persuasive, yakni melalui surat penyampaian timeline maupun surat himbauan pelaksanaan revisi data capaian serta bukti dukung bagi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD yang masih belum sesuai data capaian serta data dukungnya.

Adapun hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Tyas Kurnia Sari, SE selaku perencana pada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo :

“Penyusunan LPPD kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kerjasama dan sinergi berupa koordinasi, motivasi, komunikasi dan penyampaian perintah antar OPD sebagai perangkat daerah pelaksana urusan LPPD dengan bagian pemerintahan sebagai pembina penyusunan LPPD yang sesuai dengan ketentuan berjalan optimal, sehingga tujuan strategi penyusunan LPPD dapat tercapai”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, di dapatkan informasi bahwa kegiatan oengarahan berupa koordinasi, movivasi, komunikasi dan penyampaian perintah dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD telah dilaksanakan

dengan baik, sehingga tujuan-dilaksnakannya Strategi penyusunan LPPD dapat tercapai.

4. Aksi (Action)

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai pelaksana aksi, yakni penyusun langkah-langkan strategi sekaligus penggerak seluruh Tim Koordinasi LPPD dalam pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan langkah-langkah dilakukan melalui disusunnya timeline pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penggerak bagi seluruh tim dilakukan dengan menyampaikan timeline yang telah disusun kepada seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Setelahnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD melakukan aksi berupa pengisian data serta bukti dukung yang sesuai dengan IKK Outcome masing-masing urusan dan sesaat sebelum dokumen selesai disusun, Tim evaluator internal dalam hal ini APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi berupa Reviu pberdasarkan data capain dan bukti dukung yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Asmara Hadi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo :

“Masing-masing anggota dari Tim Koordinasi LPPD telah menjalankan perannya dengan optimal, sesuai dengan rencana atau timeline pelaksanaan strategi yang telah disusun, sehingga tujuan pelaksanaan strategi dapat terwujud”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan baik sehingga bisa tercapai tujuan dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

5. Belajar (Learning)

Berdasarkan hasil pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Hal ini Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah dapat mengidentifikasi apasaja kendala-kendala dalam pelaksanaan setiap IKK di masing-masing urusan LPPD melalui dilaksanakannya Pendampingan dan pra evaluasi oleh TIM evaluator daerah provinsi dan evaluator nasional, yang mana dalam pelaksanaanya, Perangkat Daerah pelaksana LPPD diberikan masukan serta strategi dan upaya bagi masing-masing perangkat daerah pelaksana LPPD. Seperti halnya yang sebutkan oleh Mohammad Lukman Arif Selaku Analis Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman berupa rencana pelaksanaan kedepan dalam meningkatkan capaian

kinerja LPPD dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan capaian”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa Strategi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo memberikan pemahaman dan membuka wawasan bagi Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat melaksanakan peningkatan capaian serta penyusunan rencana aksi penyelenggaraan urusan LPPD berdasarkan hasil pendampingan dan pra evaluasi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi setiap indikator dalam teori Geoff Mulgan tentang pelaksanaan Strategi.

4.2.5 Faktor Internal dan Eksternal dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo melalui Analisis SWOT

Berdasarkan hasil uraian dari wawancara mendalam yang dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari faktor Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan juga dari faktor eksternal yang terdiri dari pelyang dan ancaman pada pelaksanaan strategi pemerintah. Guna menjawab pertanyaan faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan strategi penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku sekretariat pelaporan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

4.2.5.1 Faktor Internal

1. Kekuatan (Strengths)

Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau diunggulkan oleh sebuah organisasi. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi. Kekuatan terdapat : (a) Jaringan internet (b) Motivasi Aparatur, (c) Sarana dan Prasarana dan (d) Adanya dasar hukum. Dijelaskan sebagai berikut

A. Adanya Jaringan internet

Jaringan Internet (Network) adalah sebuah sistem informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan sejumlah computer serta perangkat lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses internet termasuk untuk terhubung ke situs Portal Data Kinerja yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yaitu

<https://portaldatakinerja.sidoarjokab.go.id/> agar nantinya dapat memudahkan proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo, seperti halnya yang disampaikan oleh Asmara Hadi, S.STP, M.AP selaku Kepala Bagian Pemerintahan bahwa :

“Menurut saya, yang menjadi kekuatan kami adalah menerapkan sistem informasi Portal Data Kinerja yang berbasis Online tentunya harus didukung oleh adanya jaringan internet yang memadai, bukan hanya di Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pengumpulan data, tetapi juga disetiap kantor-kantor Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD. Kondisi daerah di Kabupaten Sidoarjo yang sudah seluruhnya terfasilitasi internet memudahkan proses pengumpulan data berbasis online maka dalam hal itu kami memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan pemerintah yaitu sudah tersedianya akses jaringan internet di setiap wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kantor-kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD. dimana berdasarkan hal tersebut seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan LPPD dapat melaksanakan pengumpulan data, termasuk kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi berbasis online. Hal ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan e-government di Kabupaten Sidoarjo, serta dengan adanya sistem jaringan internet maka akan lebih memudahkan untuk dilaksanakan monitoring serta evaluasi oleh pimpinan di Kabupaten Sidoarjo karena setiap pelaksanaan kegiatan dapat di monitoring dari manasaja dan kapan

saja dan apabila ada update perubahan data dari Perangkat Daerah dapat segera di tindaklanjut oleh sekretariat pengumpulan data LPPD, tidak menunggu di jam kerja saja. Seperti yang disampaikan oleh Mohammad Lukman Arif, SE selaku analis perencanaan sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD khususnya pengumpulan data berbasis Online melalui Sistem Informasi Portal Data Kinerja adalah adanya jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga pengumpulan data bisa dilakukan darimana saja dan kapan saja, tidak mengharuskan dilakukan tatap muka dan di jam kerja saja”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan LPPD berbasis online adalah jaringan Internet yang telah tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga Perangkat Daerah dapat melakukan update data darimana saja dan kapan saja.

B. Adanya Motivasi Aparatur

Motivasi yang tinggi dimiliki oleh aparatur pemerintah di Kabupaten Sidoarjo khususnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan setiap tahapan penyusunan LPPD yang telah disusun oleh Bagian Pemerintaha selaku sekretariat pengumpulan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa meningkatkan

kinerja serta profesionalisme sehingga tujuan mempertahankan dan meningkatkan Skor Kinerja LPPD yang bersumber dari data capaian serta data dukung yang akan di laporkan dalam dokumen LPPD juga dapat tercapai. Seperti yang telah disampaikan oleh Kasiatun selaku Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kekuatasn dalam menjalankan Strategi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini mulai dari pengumpulan di Portal Data Kinerja sampai dengan pelaksanaan pendampingan serta pra-evaluasi adalah motivasi dari Aparatur Perangkat Daerah Pelaksana dan Tim penyusunan LPPD karena itu sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya strategi dapat dilakukan, terlebih ini adalah evaluasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat, yang dinilai secara nasional”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan informan, maka penelilti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan pemerintah dalam strategi penyusunan LPPD Motivasi aparatur yang ada pada tiap-tiap Perangkat Daerah Pelaksana LPPD. Adanya motivasi pada perangkat daerah tersebut sehingga setiap aparatur berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan bukti dukung dengan baik, tidak hanya pelaporannya saja yang meningkat, tetapi juga kinerja nyata di lapangan. Selanjutnya ditambahkan oleh Candra Yuniati, S.IP selaku Tim Peyusun Dokumen LPPD Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Saya rasa motivasi juga menjadi unsur terpenting, karena untuk apa membuat strategi yang baik tetapi pelaksana dalam hal ini aparatur yang melaksanakan tidak memiliki motivasi dalam menjalankan strategi atau tugasnya masing-masing, maka dari itu saya piker kami disini selaku Tim penyusunan

LPPD di Kabupaten Sidoarjo memiliki motivasi untuk terus melaksanakan meninkatan dalam melaksanakan tiap-tiap urusan sesuai tugasnya masing-masing dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan pada strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya motivasi aparatur pelaksana urusan LPPD yang menunjang lancarnya pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

C. Adanya Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari suatu strategi dilaksanakan. Hal itu diakibatkan karena dalam melaksanakan pengisian data melalui Sistem Informasi berbasis Online yakni Portal Data kinerja dan pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi juga dilakukan dengan online melalui aplikasi yang sama, diperlukan perangkat komputer maupun laptop untuk melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten Sidoarjo, sudah hamper seluruh staf difasilitasi dengan perangkat komputer maupun laptop, selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid juga memerlukan perangkat software dan hardware yang memadai, adapun semua sarana dan prasarana tersebut sudah tersedia di Kabupaten Sidoarjo, dan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pelaksan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Dini

Chaya, S.Kom, Kepala Sub Perencanaan Sub Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selaku Perangkat Daerah Pelaksana LPPD mengatakan bahwa :

“Seperti yang bisa dilihat diseluruh kantor di Kabupaten Sidaorjo, sudah hampir seluruh Aparatur di Kabupaten Sidaorjo telah difasilitasi dengan Komputer dan Laptop, karena memang sebagian sistem pemerintahan sudah berbasis online. Sedangkan untuk perangkat komunikasi lainnya, kami berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidaorjo untuk penggunaanya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasn, maka peneliti dapat menagambil kesimpulan bahwa sarana-dan prasarana dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sudah cukup memadai yakni berupa komputer dan laptop untuk melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten Sidoarjo

D. Adanya Dasar Hukum yang Jelas

Setiap tahunnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Dearah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Penyusunan LPPD sesuai dengan tahun anggaran yang disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, berikut adalah beberapa Surat Keputusan yang telah dibentuk selama 3 tahun terakhir :

Tabel 4.12 Daftar Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	No SK	Tentang
2021	188/47/438.1.1.3/2022	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Tahun anggaran 2022
2022	188/41/438.1.1.3/2023	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Tahun anggaran 2023
2023	100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024	Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Tahun anggaran 2024

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

Didalam Surat Keputusan Kepala daerah tentang Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur tentang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah pelaksana LPPD sehingga tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. sesuai dengan hasil wawancara dengan Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md, Akun selaku Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa :

“Bisa dikatakan bahwa kekuatan kami untuk dapat terus melaksanakan strategi penyusunan LPPD yaitu adanya dasar hukum yang jelas tentang masing-masing tugas pokok dan fungsi, sehingga kami selaku sekretariat penyusunan dokumen LPPD dalam menyusun strategi juga memperhatikan masing-masing tugas pokok dan fungsi”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kekuatan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah sudah ada dasar hukum yang mengatur tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya ada pada organisasi baik itu keterampilan maupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi itu sendiri. Adapun tyang menjadi kelemahan dalam strategi penyusunan dokumen LPPD adalah : (a) Kurangnya Skill dan (b) Kurangnya Anggaran.

A. Kurangnya Skill

Kurangnya skill yang dimiliki oleh aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan penginputan data berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan LPPD dikarenakan penginputan yang dilakukan online berbasis Sistem informasi Portal Data Kinerja, sehingga untuk Aparatur Perangkat Daerah yang tidak terbiasa dengan sistem online akan mengalami beberapa kesulitan dalam penggunaan komputer, selaiun itu adanya rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal

Data Kinerja. Sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md.Akun Auditor Terampil Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selaku Tim APIP Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kelemahan pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill yang disebabkan oleh adanya rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal Data Kinerja dan juga aparatur baru seringkali tidak memahami maksud indikator LPPD, serta saat dilakukan pendampingan orang yang hadir beda dengan yang menangani, sehingga informasi tidak tersampaikan maksimal”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasni diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kelemahan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill dari aparatur pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

B. Kurangnya Anggaran

Anggaran sangat penting untuk dialokasikan untuk menopang kelancaran dalam pelaksanaan pembiayaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan keseluruhan sesuai dengan timeline strategi yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, serta anggaran yang telah dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas namu pada nyatanya anggaran untuk pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten

Sidoarjo seringkali tidak menjadi anggaran prioritas untuk di alokasikan di Bagian pemerintahan oleh TAPD. Padahal anggaran tersebut sangat penting untuk pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Eksternal, dikarenakan Kabupaten Sidoarjo harus menganggarkan Honorarium sebagai Narasumber pelaksanaan pendampingan dan Pra-evaluasi. Sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

“Selama ini, Kelemahannya strategi penyusunan LPPD adalah kurangnya anggaran, karena memang dalam pelaksanaan strategi ini yang terpenting adalah kegiatan pendampingan dan pra-evaluasi, dimana dalam pelaksanaannya kita harus menganggarkan honorarium bagi masing-masing evaluator, sehingga apabila anggaran ini tidak “goal” atau tidak lolos dalam pembahasan TAPD, kegiatan strategi penyusunan LPPD tidak dapat dilaksanakan”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu kelemahan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya anggaran bagi pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

4.2.5.2 Faktor Eksternal

1. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan berbagai hal atau suatu kondisi yang menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Dalam menganalisis peluang, keadaan dan kondisi yang merupakan

peluang yang ada diluar suatu organisasi atau instansi juga memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari (a) Adanya Kebijakan Pemerintah, (b) Pesatnya perkembangan Teknologi

A. Adanya Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pelaksanaan penyusunan Dokumen LPPD melalui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPI, dan RLPPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni Peraturan bagi setiap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadikan Strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan maksimal, sesuai yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

“Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang mewajibkan dilaksanakan penyusunan LPPD bagi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan LPPD dapat melakukan penekanan terhadap perangkat daerah pelaksana LPPD, sehingga strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan dengan maksimal”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu

peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan dilaksanakan upaya dalam penyusunan LPPD bagi Pemerintah Daerah.

B. Pesatnya Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang signifikan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berbasis e-government yang mewajibkan setiap Aparatur Perangkat Daerah dapat mengoperasikan Sistem Informasi Berbasis elektronik, salah satunya Sistem Informasi Portal Data Kinerja yang dibangun dengan tujuan menjadikan kegiatan penyusunan LPPD lebih efektif dan efisien, karena yang sebelumnya dilaksanakan harus dengan tatap muka dan di jam kerja, maka dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan penyusunan dapat dilaksanakan melalui sistem darimana saja, kapan saja dan diakses oleh siapa saja. Sesuai dengan pernyataan dari Nur Aini, S.KM, selaku perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selaku Perangkat Daerah Pelaksana LPPD mengatakan bahwa :

“Peluang yang sangat dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD adalah membangun sistem informasi berbasis elektronik, yang sangat memudahkan kami selaku Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD dalam menyampaikan data kepada Bagian Pemerintahan, karena biasa diakses kapan saja dan dimana saja, tidak kaku harus dilakukan dengan metode tatap muka”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah pesatnya perkembangan teknologi yang juga dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat penyusunanl dokumen LPPD untuk membangun juga Sistem informasi Portal Data Kinerja, sehingga pelaksanaan Penyusunan LPPD dapat terlaksana dengan maksimal.

2. Ancaman (Treats)

Ancaman merupakan hal-hal diluar organisasi yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan organisasi, yang mana jika tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi. Faktor Adapun yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan Strategi penyusunan LPPD adalah adanya (a) Kebocoran keamanan Sistem dan (b) Perubahan Kebijakan, penjelasannya yaitu :

A. Kebocoran Sistem Keamanan

Adanya kemungkinan kebocoran sistem informasi, mengingat dunia digital yang dapat diakses oleh semua orang dari seluruh penjuru dunia, menjadikan Portal Data Kinerja harus di lengkapi dengan sistem keamanan yang lebih tinggi, mengingat data pentingnya data yang tersimpan dalam sistem tersebut, karena apabila terjadi kebocoran keamanan, makan memungkinkan

terjadinya data hilang atau tidak sesuai, sehingga menyebabkan pengelolaan dan analisa data yang memakan waktu lama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasiatun selaku Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang kami takutkan sebagai ancaman adalah adanya hacker yang mengganggu sistem keamanan di portal data kinerja, karena saat ini Portal Data Kinerja selain sebagai media pengumpulan data, juga sebagai penyimpanan arsip pelaporan LPPD, yang mana apabila data itu hilang, kami juga kerepotan dalam menyusun kembali data-data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah Kebocoran Sistem Informasi yang dapat menyebabkan hilangnya data yang tersimpan dalam jaringan sistem tersebut, karena selain sebagai media pengumpulan data, Sistem data Portal kinerja merupakan sarana penyimpanan arsip pengumpulan data yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

B. Perubahan Kebijakan

Adanya perubahan indikator terhadap pelaksanaan penyusunan LPPD oleh pemerintah pusat yang tanpa dilengkapi dengan penjelasan teknis yang memadai menjadikan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD menjadi kesulitan dalam menyajikan data yang sesuai dengan yang diinginkan indikator LPPD. Selain itu

keterbatasan pemahaman dari Sekretariat Penyusunan LPPD dalam menjelaskan perubahan indikator yang ada juga menjadikan penyampaian serta penyusunan dokumen LPPD menjadi tidak maksimal, seperti yang disampaikan oleh Tyas Kurnia Sari, selaku Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

“Adanya perubahan indikator, baik perubahan rumus, maupun perubahan indikator keseluruhan menjadi sebuah ancaman bagi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah maupun Bagian pemerintah untuk mengartikan dari adanya perubahan indikator yang ada”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah adanya perubahan kebijakan yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya pengumpulan data, dikarenakan biasanya perubahan indikator tidak dibarengi dengan penjelasan yang memadai, sehingga menyebabkan data yang dikumpulkan dalam strategi penyusunan LPPD dapat tidak maksimal.

Tabel 13 Matriks analisis SWOT

	STRENGTHS	WEAKNESSES
	1. Adanya Jaringan Internet 2. Adanya Motivasi Aparatur 3. Adanya Sarana Dan Prasarana 4. Adanya Dasar Hukum	1. Kurangnya Skill 2. Kurangnya Anggaran
OPPORTUNITIES	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat 2. Pesatnya Perkembangan Teknologi	<p>1) Adanya Dasar Hukum Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang tugas dan pokok Tim Koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan sebuah pijakan yang kuat bagi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD untuk memberikan penekanan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan dan melaporkan capaian serta bukti dukung sehingga pelaporan dokumen LPPD dapat dengan maksimal disampaikan.</p> <p>2) Adanya jaringan dan Pesatnya Perkembangan Teknologi. Dengan adanya jaringan internet yang memadai diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kantor-kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD maka akan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan e-government di daerah, salah satunya yakni pengembangan Portal Data Kinerja sebagai Sistem informasi pengumpula data dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p>1) Meningkatkan Skill SDM Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD</p> <p>2) Peningkatan tenaga, Sarana dan Prasarana Jumlah tenaga aparatur yang masih belum memadai juga menyebabkan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome dan 494 IKK Output, hanya terdapat 3 Staf Bagian Pemerintahan yang melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya tambahan tenaga, diharapkan akan meningkatkan kualitas dari dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>
THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT

<p>1. Kebocoran Sistem Keamanan</p> <p>2. Adanya Perubahan Kebijakan</p>	<p>1) Adanya dukungan kewenangan</p> <p>Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia didukung alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan kegiatan penyampaian strategi penyusunan LPPD sehingga seluruh rangkaian strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Termasuk juga pengamanan sistem informasi, sehingga data yang tersimpan dalam porta data kinerja dapat terjamin keamanannya</p> <p>2) Menggunakan azas profesionalitas</p> <p>Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparaturnya penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p>	<p>1) Meningkatkan Skill dan pengetahuan</p> <p>Meningkatkan skill dan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD.</p> <p>2) Menerapkan azas profesionalitas</p> <p>Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparaturnya penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>3) Menerapkan azas kerja</p> <p>Menerapkan bahwa kerja adalah ibadah meyakini bahwa kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan sehingga, dalam menyampaikan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan sesuai dengan kondisi senyatanya dan berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean government</i>).</p>
--	--	---

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam organisasi, maka sangat diperlukan penelitian dengan kecermatan adar mampu menemukan strategi yang cepat dan tepat dalam

menagtasi masalah yang timbul dalam organisasi. Dengan menggunakan analisis SWOT, maka antara faktor internal dan eksternal dapat dijadikan sebuah interaksi, sehingga menghasilkan suatu solusi atau bentuk upaya dalam menangani setiap hambatan yangterjadi. Dari hasil interaksi faktor di Kabupaten Sidoarjo adalah mengupayakan 4 strategi yaitu :

1. Kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada antara lain yaitu :

1) Adanya Dasar Hukum

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang tugas dan pokok Tim Koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan sebuah pijakan yang kuat bagi Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD untuk memberikan penekanan bagi Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dalam melaksanakan dan melaporkan capaian serta bukti dukung sehingga pelaporan dokumen LPPD dapat dengan maskimal disampaikan.

2) Adanya jaringan dan Pesatnya Perkembangan Teknologi.

Dengan adanya jaringan internet yang memadai diseluruh wilayah Kabupaten Sidaorjo khususnya Kantor- kantor Perangkat Daerah pelaksana LPPD maka akan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan e-government di daerah, salah satunya yakni pengembangan

Portal Data Kinerja sebagai Sistem informasi pengumpul data dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

2. Kekuatan untuk menghindari ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman antara lain yaitu :

1) Adanya dukungan kewenangan

Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia didukung alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan kegiatan penyampaian strategi penyusunan LPPD sehingga seluruh rangkaian strategi penyusunan LPPD dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Termasuk juga pengamanan sistem informasi, sehingga data yang tersimpan dalam portal data kinerja dapat terjamin keamanannya

2) Menggunakan azas profesionalitas

Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparatur penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

3. Mengurangi Kelemahan mengejar peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan Skill SDM

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD

2) Peningkatan tenaga, Sarana dan Prasarana

Jumlah tenaga aparatur yang masih belum memadai juga menyebabkan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, karena dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome dan 494 IKK Output, hanya terdapat 3 Staf Bagian Pemerintahan yang melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo, dengan adanya tambahan tenaga, diharapkan akan meningkatkan kualitas dari dokumen LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

4. Mengurangi Kelemahan untuk menghindari ancaman

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan Skill dan pengetahuan

Meningkatkan skill dan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan pendampingan, pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD.

2) Menerapkan azas profesionalitas

Dalam menghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada, sikap optimis dan profesional dari aparatur penyelenggaraan urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

3) Menerapkan azas kerja

Menerapkan bahwa kerja adalah ibadah meyakini bahwa kegiatan pemerintahan merupakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan sehingga, dalam menyampaikan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan sesuai dengan kondisi senyatanya dan berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Berdasarkan analisa SWOT yang dilakukaan, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk jawaban dari pelaksanaan analisis SWOT yang ada, karena jika dilihat dari sisi SO (*Strenghts Opportunities*)

atau Kekuatan pemanfaatan peluang, melalui Strategi Penyusunan LPPD yakni ditetapkannya SK Tim koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, memudahkan pelaksanaan pembagian tugas dan koordinasi serta komunikasi dalam penyusunan LPPD serta Penggunaan Sistem Informasi Portal Data Kinerja, sebagai upaya pengoptimalan kekuatan berupa adanya jaringan internet yang kuat di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Tim koordinasi penyusunan LPPD .

Dari sisi analisa kekuatan untuk menghindari ancaman, atau ST (*Strenghts Threats*) kekuatan dalam hal ini adanya motivasi aparatur merupakan suatu sikap profesionalitas yakni adaptif bagi aparatur yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan indikator yang mungkin muncul dalam penyusunan LPPD, selain itu dilaksanakannya Pendampingan dan Pra-evaluasi juga sebagai upaya penyampaian penjelasan tiap-tiap perubahan indikator yang berubah dari tahun ke tahun.

Dalam mengurangi kelemahan dengan mengejar peluang, atau (*Weaknesses Opportunities*) kelemahan kurangnya skill dari aparatur yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, melalui pendampingan dan pra-evaluasi dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan skill dalam Menyusun dokumen dan meningkatkan capaian serta skor LPPD dari tahun ke tahunnya.

Sedangkan dalam upaya (*Weaknesses Threats*) mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman, melalui strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo, yakni pendampingan dan pra-evaluasi LPPD di Kabupaten Sidoarjo maka kekurangan berupa kurangnya skill dan adanya perubahan indikator dalam penyusunan LPPD setiap tahunnya dapat diminimalisir, karena melalui pendampingan dan pra-evaluasi LPPD oleh evaluator daerah dan nasional yang dilaksanakan hasilnya berupa peningkatan pemahaman dalam Menyusun data serta bukti dukung yang sesuai dengan IKK Urusan LPPD yang hasil akhirnya adalah peningkatan skor capaian dan status kinerja LPPD.